



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

RENSTRA

2025 - 2029

Badan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Kota Kupang

2025



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KUPANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Peraturan Wali kota Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Kemendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 307);
8. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 ; (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 313);
9. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 315);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA-KUPANG TAHUN 2025-2029.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini:

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Kupang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang.

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Daerah Kota Kupang.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk Periode 1 (satu) Tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Periode 5 (lima) Tahunan.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Periode 1 (satu) Tahunan.

Pasal 2

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 berpedoman pada Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kupang (RPJMD) 2025-2029.

Pasal 4

Ruang Lingkup Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 memuat:

- a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c. Strategi dan Arah Kebijakan serta Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan dan
- d. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Pasal 5

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 disusun Dengan Sistematika, terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Sub bab Gambaran pelayanan tentang tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja pelayanan Perangkat Daerah, kelompok sasaran layanan. Mitra

Perangkat Daerah, dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah (apabila ada) dan kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Daerah (apabila ada).

2. Sub bab Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah memuat permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dan isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang Tujuan, Sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dan target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB III

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 7

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan kewenangan dan tanggung jawab setiap Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 8

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, dapat dilakukan perubahan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antar target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan;
- c. Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan Nasional.

Pasal 9

Dokumen dan penjelasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

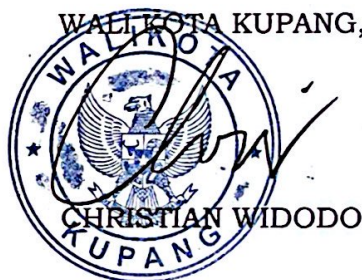
Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

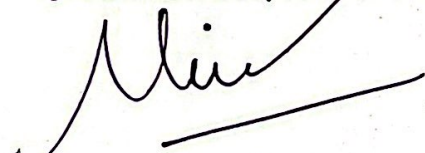
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 September 2025

WALI KOTA KUPANG,



Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,



IGNASIUS R. LEGA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2025 NOMOR 719

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Bappeda Kota Kupang (pemrakarsa)	

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2029 merupakan pengaplikasian Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap Instansi Pemerintah harus memiliki Rencana Strategis dalam jangka 5 (lima) Tahun kedepan dalam masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, dalam penyusunan Rencana Strategis ini sangat terkait dengan Visi dan Misi Pemerintah Kota Kupang Periode 2025 -2029 yang tertuang dalam RPJMD Kota Kupang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) secara teknis berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, dan kami menyadari dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang masih terdapat berbagai kekurangan yang memerlukan masukan sebagai upaya perbaikan.

Dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami berharap bahwa Rencana Strategis (Renstra) dapat berguna dalam upaya memujudkan Visi Kota Kupang yaitu ***“Kota Kasih sebagai Rumah Bersama yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan”***.

Kupang, 18 September 2025

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kupang,

Jackson Jimmy Aryant Tunliu,SE.,MM
Pembina
NIP. 19750405 200501 1 007

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan	

DAFTAR ISI

		Hal.
	KATA PENGANTAR	i
	DAFTAR ISI	ii
	DAFTAR TABEL	iii
	DAFTAR GAMBAR	iv
Bab I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan Hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	10
	2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	10
	2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	10
	2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	15
	2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
	2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	26
	2.1.5 Kerjasama Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah	26
	2.2 Identifikasi Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	26
	2.2.1 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	32
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	40
	3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bukan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	40
	3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	45
	3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah	46
BAB IV	PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	54
	4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah	54
	4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan	159
BAB V	PENUTUP	163

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Pegawai berdarakan Unit Kerja Tahun 2025	15
Tabel 2.2 Kelompok Jabatan Struktural	16
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	17
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	19
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	21
Tabel 2.6 Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021-2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	24
Tabel 2.7 Teknik Merumuskan Isu Strategis	33
Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancanagn Akhir Renstar Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kupang	42
Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	48
Tabel 3.3 Penatahapan Renstra Badan Keuangan dan Aset daerah Kota Kupang	51
Tabel 3.4 Sinergi Arah Kebijakan Perangkat Daerah dengan Arah Kebijakan RPJMD	51
Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kupang	56
Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kota Kupang	89
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daearh Rancangan Akhir Pemerintah Kota Kupang	151
Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancanagn Akhir Renstra Pemerintah Kota Kupang	152
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kota Kupang	161
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Kupang.	162

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Tipe B) (Peraturan Wali Kota Kupang No. 60 Tahun 2021)	13
Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang	40
Gambar 3.2 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah	41
Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang wajib disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam konteks Pemerintah Kota Kupang, penyusunan Renstra oleh masing-masing OPD harus mengacu dan selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang. RPJMD menjadi dokumen utama yang menjadi landasan penyusunan Renstra OPD karena memuat agenda pembangunan strategis daerah yang berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT RW) Kota Kupang. Renstra OPD juga memiliki keterkaitan fungsional dan hierarkis dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) serta Renstra provinsi, terutama dalam kerangka pembangunan nasional yang terintegrasi. Keselarasan ini penting untuk memastikan sinergi program lintas sektor dan antar level pemerintahan, sehingga tujuan pembangunan nasional dan daerah dapat dicapai secara harmonis dan terpadu.

Dalam implementasinya, RPJMD dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Di sisi lain, Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Dengan demikian, Renstra OPD memiliki posisi strategis sebagai jembatan antara RPJMD dan dokumen perencanaan tahunan (Renja), serta penganggaran daerah (APBD), yang secara keseluruhan menunjukkan adanya kesinambungan, keterpaduan, dan konsistensi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

Struktur organisasi dan tata kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta diperkuat dengan Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota. Sebagai perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan dan aset, BKAD memiliki kewenangan untuk mengelola seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan

uang, serta mengelola kekayaan daerah baik berupa uang maupun barang. Pelaksanaan fungsi ini harus berlandaskan prinsip tertib administrasi, kepatuhan hukum, efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya Pasal 6 ayat (2) huruf c, pengelolaan keuangan daerah berada di bawah kekuasaan kepala daerah, dalam hal ini Wali Kota, yang bertindak sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sekaligus wakil pemerintah atas kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi kepala daerah untuk menetapkan kebijakan strategis di bidang keuangan dan aset daerah. Sebagai tindak lanjutnya, BKAD Kota Kupang menyusun Rencana Strategis Tahun 2025–2030 sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan prioritas, serta target kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Renstra BKAD dirancang berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kapasitas fiskal daerah serta dukungan dari pemangku kepentingan. Dokumen ini menjadi pedoman operasional bagi seluruh aparatur di lingkungan BKAD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terarah, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Renstra juga merupakan bentuk dukungan aktif terhadap kebijakan pembangunan daerah, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan dan penataan aset. Fokus strategis yang diusung adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola keuangan daerah serta optimalisasi pengelolaan aset melalui penguatan tiga elemen utama, yaitu sumber daya manusia (*man*), sumber daya keuangan (*money*), dan sarana prasarana/aset daerah (*material*). Diharapkan dengan penguatan terhadap ketiga aspek tersebut, pengelolaan keuangan dan aset di Kota Kupang dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel demi mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tahun 2025-2029 disusun berdasarkan pada Landasan Hukum, sebagai berikut:

1. Undang–Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan menjadi Undang – undang Nomor 2 tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 677);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemukthahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pemabngunan dan Keuangan Daerah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemuktahiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah, dan Pulau;
32. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang;
34. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 01);
35. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 315);
36. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
37. Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2021 Nomor 577);
38. Peraturan Walikota Kupang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Kupang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 591).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang Tahun 2025-2030 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKAD secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun dengan maksud untuk mengoptimalkan arah kebijakan pokok pembangunan daerah sebagaimana tercermin dalam visi, misi, serta program prioritas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Kupang. Dengan demikian, setiap alokasi dan penggunaan anggaran oleh BKAD diharapkan dapat dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran sesuai dengan profil layanan dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah untuk melakukan koreksi terhadap proses perencanaan dan penganggaran, agar sejalan dengan tujuan, sasaran, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Renstra juga menjadi kerangka dasar dalam meningkatkan pendapatan daerah serta kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh. Di sisi lain, dokumen ini berfungsi untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan oleh Wali Kota, sekaligus menjadi dasar dalam pengajuan usulan anggaran pada tahun-tahun berikutnya.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2030 disusun dengan mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, penyusunan dokumen Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang Tahun 2025-2030 mengikuti sistematika yang telah ditetapkan secara normatif guna memastikan keterpaduan, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan strategis di tingkat perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh. Adapun sistematika perencanaan strategis ini memuat bagian-bagian penting yang mencerminkan analisis situasi, perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program dan kegiatan prioritas, serta sistem pengukuran kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, Fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

- Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,

Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

- Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

- Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menguraikan tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daerah perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, dan kerjasama yang menjadi tanggungjawab perangkat daerah.

- Permasalahan pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan pelayanan dan isu strategis perangkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

- Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah bukan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

- Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam empat tahun mendatang.

- Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Pada bagian ini diuraikan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra perangkat daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pada bagian ini diuraikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja perangkat daerah

- Kinerja Penyelenggaran Bidang Urusan

Pada bagian ini uraikan kinerja penyelenggaran bidang urusan perangkat daerah yang akan dicapai

BAB V PENUTUP

- Dalam bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan antara lain Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang merupakan dokumen yang akan diacu dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahun.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang, serta Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang, maka secara jelas digariskan bahwa tugas pokok BKAD Kota Kupang adalah:

"Membantu Wali Kota melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang Keuangan dan Aset Daerah serta tugas pembantuan."

Untuk melaksanakan tugas tersebut, BKAD Kota Kupang memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang keuangan dan aset daerah;
4. Pelaksanaan administrasi dinas daerah di bidang keuangan dan aset daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsi tersebut dijalankan secara terstruktur melalui unit-unit organisasi di lingkungan BKAD, yang terdiri atas sekretariat, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset, serta unit-unit pendukung lainnya.

1. Sekretariat

Tugas: melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyusunan rencana, program dan anggaran Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Badan yang meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, ketatalaksanaan,

- kepegawaian, kepustakaan, keuangan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja badan; dan
- e. pelaksanaan tugas badan lain yang diberikan oleh atasan.

2. Bidang Anggaran

Tugas: melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan, anggaran belanja langsung serta hibah dan bantuan sosial.

Fungsi:

- a. perumusan perencanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan anggaran dan perubahan anggaran,
- c. penyiapan bahan serta petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. penyiapan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. penelitian Rencana Kerja Anggaran OPD (RKA-OPD);
- f. penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD (DPA-OPD);
- g. penyiapan dokumen Surat Penyediaan Dana (SPD);
- h. pelaksanaan pengendalian administrasi keuangan daerah;
- i. pengkoordinasian dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang anggaran;
- j. pengkajian pelaksanaan usulan penyertaan modal atas nama pemerintah daerah;
- k. pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan dibidang penyusunan anggaran; dan
- l. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perbendaharaan

Tugas: melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kas umum daerah, belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- b. penyiapan anggaran kas, menetapkan SPD dan menerbitkan SP2D;

- c. pelaksanaan pengelolaan gaji, pemungutan pajak, permintaan pendapatan dana transfer dan penyimpanan/penempatan uang daerah;
- d. penyusunan rancangan Keputusan Walikota tentang pembukaan rekening kas umum daerah;
- e. penyusunan pedoman teknis pembukaan rekening Bank bagi SKPD;
- f. penyusunan rancangan penetapan uang persediaan bagi SKPD;
- g. pemantauan kas penerimaan dan pengeluaran APBD dalam rekening kas daerah;
- h. penyiapan dokumen permintaan pembayaran bagi penerimaan daerah yang menjadi hak daerah;
- i. pelaksanaan pembukuan pencatatan penerimaan dan pengeluaran pengelolaan keuangan daerah serta penyimpanan dokumen bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- j. pengkoordinasian pemotongan dan penyetoran iuran wajib pegawai dan/atau pajak-pajak melalui daftar gaji perangkat daerah;
- k. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP);
- l. pelaksanaan analisa, evaluasi dan pelaporan dibidang perbendaharaan; dan
- m. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Akuntansi dan Aset

Tugas: melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelaporan keuangan, pencatatan dan pemanfaatan aset.

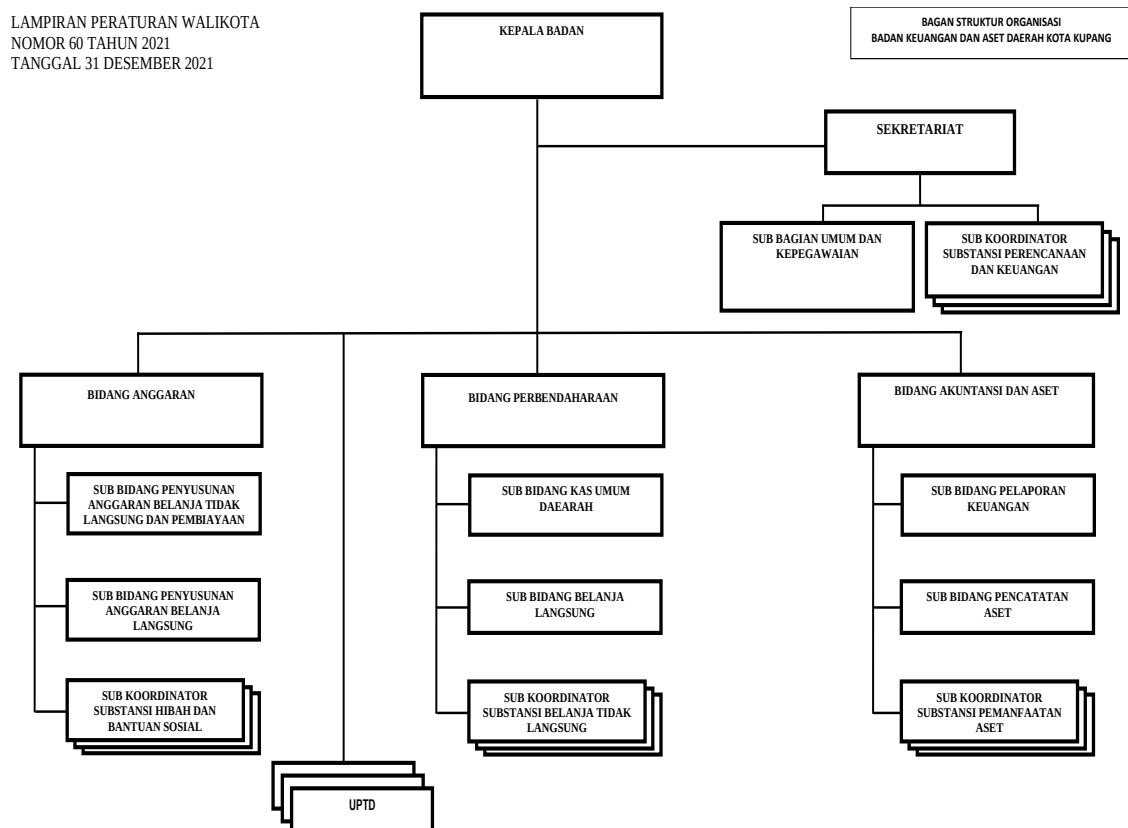
Fungsi:

- a. penyusunan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah;
- b. pelaksanaan sistem akuntansi pengelolaan keuangan daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
- c. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. penyusunan, pengkoordinasian rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- e. pelaksanaan pembinaan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- f. penyiapan data rewiuw Inspektorat Daerah, Pemeriksaan BPK-RI dan APIP lainnya;

- g. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
- h. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
- i. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
- j. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah; dan
- k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh atasan.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi di atas, dapat terlihat bahwa pelaksanaan tugas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang dijalankan secara terstruktur melalui susunan organisasi yang terdiri atas unit-unit fungsional yang saling terintegrasi. Struktur organisasi ini dirancang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional, efisien, dan akuntabel. Adapun struktur organisasi BKAD Kota Kupang adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi
Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang (Tipe B)
(Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021)



Sumber: Peraturan Wali Kota Kupang Nomor 60 Tahun 2021

Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang antara lain:

1. Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang oleh jajaran struktur :

2. Sekretaris, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan;

3. Bidang Anggaran, terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung; dan
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah dan Bantuan Sosial;

4. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari;

1. Sub Bidang Kas Umum Daerah;
2. Sub Bidang Belanja Langsung; dan
3. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Belanja Tidak Langsung;

5. Bidang Akuntansi dan Aset, terdiri dari :

1. Sub Bidang Pelaporan Keuangan;
2. Sub Bidang Pencatatan Aset; dan
3. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset;

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memiliki personel sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) pegawai yang terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) PNS dan 39 (tiga puluh delapan) PPPK serta 9 (sembilan) PTT. Yang diposisikan dimasing-masing bidang yang ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah, dimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1 Pegawai berdasarkan Unit Kerja Tahun 2025

NO	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI			TOTAL
		PNS	PPPK	PTT	
1	Sekretariat	6	7	3	16
2	Bidang Anggaran	10	10	3	23
3	Bidang Perbendaharaan	10	5	2	17
4	Bidang Akuntansi dan Aset	13	17	1	31

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang ditopang oleh sumber daya manusia yang terdiri dari 87 (delapan puluh tujuh) pegawai yang dimana 39 (tiga puluh tujuh) PNS dan 39 (tiga puluh sembilan) PPPK serta 9 (sembilan) PTT. Secara kuantitatif, jumlah personel ini sudah cukup memadai untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas kedinasan secara prosedural. Namun demikian, untuk mencapai pengelolaan keuangan dan aset daerah yang optimal, diperlukan peningkatan kualitas aparatur melalui pelatihan kompetensi, pendidikan lanjutan, serta penempatan pegawai berdasarkan keahlian dan latar belakang pendidikan masing-masing.

Dari total 39 (tiga puluh sembilan) PNS yang ada, sejumlah di antaranya telah menduduki jabatan struktural di lingkungan BKAD Kota Kupang. Jabatan-jabatan struktural ini meliputi posisi strategis seperti Kepala Badan, Sekretaris, serta Kepala Bidang pada masing-masing unit kerja, yaitu Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Aset. Keberadaan pejabat struktural ini sangat penting karena mereka bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Setiap pejabat struktural ditetapkan berdasarkan kualifikasi kepangkatan, kompetensi teknis, dan pengalaman kerja yang relevan dengan bidang tugasnya.

Struktur organisasi yang diisi oleh personel dengan jabatan struktural ini menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas daerah, pencatatan akuntansi, hingga pengelolaan barang milik daerah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada

jabatan-jabatan strategis, menjadi aspek penting yang harus terus didorong untuk memperkuat kinerja BKAD secara keseluruhan dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Tabel 2.2 Kelompok Jabatan Strukturalf

NO	URAIAN	ESELON	SEHARUSNYA ADA	SUDAH TERISI
1	Kepala Badan	II B	1	1
2	Sekretaris Badan	III A	1	1
	a Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	IV A	1	-
	b Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Perencanaan dan Keuangan	IV A	1	1
3	Bidang Anggaran	III B	1	1
	a Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan	IV A	1	1
	b Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung	IV A	1	1
	c Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Hibah dan Bantuan Sosial	IV A	1	1
4	Bidang Perbendaharaan	III B	1	1
	a Sub Bidang Kas Umum Daerah	IV A	1	-
	b Sub Bidang Belanja Langsung	IV A	1	1
	c Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Belanja Tidak Langsung	IV A	1	1
5	Bidang Akuntansi dan Aset	III B	1	1
	a Sub Bidang Pelaporan Keuangan	IV A	1	1
	b Sub Bidang Pencataan Aset	IV A	1	1
	c Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset	IV A	1	1

NO	URAIAN	ESELON	SEHARUSNYA ADA	SUDAH TERISI
6	Kelompok Jabatan Fungsional	IV A	-	-

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Adapun komposisi pegawai pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang pada tahun 2025 terdiri dari total 87 (delapan puluh tujuh) orang pegawai, yang terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) serta PTT 9 (sembilan). PNS yang ada tersebar di berbagai unit kerja dan sebagian besar telah menduduki jabatan struktural maupun fungsional yang berperan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Sementara itu, PPPK berperan sebagai pendukung operasional dan administratif di seluruh bidang yang ada di lingkungan BKAD.

Komposisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, ketersediaan sumber daya manusia di BKAD Kota Kupang telah mencukupi untuk menunjang pelaksanaan fungsi organisasi. Namun demikian, tantangan ke depan terletak pada peningkatan kualitas pegawai agar mampu menjawab dinamika dan kompleksitas pengelolaan keuangan serta aset daerah yang semakin berkembang. Oleh karena itu, selain mempertahankan jumlah pegawai yang proporsional, BKAD juga perlu mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi seluruh aparatur melalui pelatihan teknis, pendidikan lanjutan, serta penguatan sistem kerja yang berbasis kinerja.

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	TINGKAT PENDIDIKAN						JENIS KELAMIN		KET.
		SD	SMP	SMA /SMK	D3	S1	S2	L	P	
1	PEMBINA UTAMA MUDA IV/C									
2	PEMBINA TK. I IV/B									
3	PEMBINA IV/A					1	3	3	1	
4	PENATA TK. I III/D				1	9	1	5	6	
5	PENATA III/C					9	1	4	6	
6	PENATA MUDA TK. I III/B			1		3	1	3	2	
7	PENATA MUDA III/A			1	1	3		5		
8	PENGATUR TK. I II/D			1					1	
9	PENGATUR II/C									
10	PENGATUR MUDA TK. I II/B			1				1		
11	PENGATUR MUDA III/A									
12	JURU I/C									
13	JURU MUDA II/A									
JUMLAH PNS		0	0	4	2	25	6	21	16	
JUMLAH PTT		0	1	13	2	30	2	25	24	
TOTAL PEGAWAI		0	1	17	4	55	8	46	40	

Sumber data: Subag Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Sarana dan prasarana kerja yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang saat ini telah tergolong cukup memadai. Fasilitas yang ada mendukung kelancaran operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari, sehingga mampu menunjang pencapaian target kinerja organisasi. Namun demikian, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin dinamis, terdapat kebutuhan untuk melakukan peningkatan, khususnya dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan ini penting agar proses kerja dapat lebih efisien, efektif, serta mampu menjawab tantangan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara lebih profesional dan akuntabel. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BKAD dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

No	JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN			TOTAL	KET
			B	RR	RB		
1	Ac Floor Standing	4	4	-	-	4	
2	Ac Split	14	13	-	1	14	
3	Adaptor Laptop/Note Book/ Net Book	1	1	-	-	1	
4	Alat Pemadam/Portable	1	1	-	-	1	
5	Alat Penghancur Kertas	2	2	-	-	2	
6	Alat Rumah tangga Lainnya	2	2	-	-	2	
7	Brandkas	7	5	-	2	7	
8	Camera Digital	3	3	-	-	3	
9	CCTV-Camera Control Television System	5	5	-	-	5	
10	Dispenser	1	1	-	-	1	
11	Distomat	2	2	-	-	2	
12	External/Portable Hardisk	8	8	2	-	10	
13	Facsimile	1	1	-	-	1	
14	Filling Cabinet Besi	4	4	-	-	4	
15	Focusing Screen/ Layar LCD Projektor	1	1	-	-	1	
16	Genset	1	1	-	-	1	
17	Geolistrik	2	2	-	-	2	
18	Global Positioning System	2	2	-	-	2	
19	Gordyn/Kray	2	2	-	-	2	
20	GPS Receiver	1	1	-	-	1	
21	Handy Cam 3	3	3	-	-	3	
22	Hub	2	2	-	-	2	
23	Kipas Angin	5	5	-	-	5	
24	Kursi Besi/Metal	82	82	-	-	82	
25	Kursi Kerja	6	6	-	-	6	
26	Kursi Putar	29	29	-	-	29	
27	Kursi Rapat	116	116	-	-	116	
28	Kursi Rapat Pimpinan	1	1	-	-	1	
29	Laptop	29	29	1	-	30	
30	LCD Projektor/Infokus	3	3	-	-	3	
31	Lemari Besi/Metal	4	4	-	-	4	
32	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	1	1	-	-	1	
33	Lemari Es	3	3	-	-	3	
34	Lemari Kayu	13	13	-	-	13	
35	Meja 1/2 Biro	42	42	-	-	42	
36	Meja Biro	5	5	-	-	5	
37	Meja Kerja Kayu	1	1	-	-	1	
38	Meja Rapat	1	1	-	-	1	
39	Meteran Laser	2	2	-	-	2	
40	Mikrotik Router	1	1	-	-	1	
41	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	5	5	-	-	5	
42	Monitor	1	1	-	-	1	
43	Multi Purpose Vehicle	1	1	-	-	1	
44	Note Book	9	9	-	-	9	
45	Note Book/Laptop	2	2	-	-	2	
46	Papan Data	6	6	-	-	6	
47	Papan Pengumuman	1	1	-	-	1	
48	Papan Struktur	1	1	-	-	1	
49	PC Unit	25	24	-	1	25	
50	Peralatan Komputer	2	2	-	-	2	
51	Peralatan Komputer (Hardisk External)	4	4	-	-	4	
52	Peralatan Komputer (Hardisk Laptop)	1	1	-	-	1	
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	27	2	1	30	
54	Rak Kayu	6	6	-	-	6	
55	Rak Server	1	1	-	-	1	
56	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	2	-	-	2	
57	Sepeda Motor	24	24	-	-	24	
58	Server	2	2	-	-	2	
59	Smart Phone	9	9	-	-	9	
60	Sofa	2	2	-	-	2	
61	Sound System	1	1	-	-	1	
62	Sport Utility Vehicle (SUV)	1	1	-	-	1	
63	Stabilisator	1	1	-	-	1	
64	Telephone (PABX)	10	10	-	-	10	
65	Televisi	3	2	-	1	3	
66	Teralis	1	1	-	-	1	
67	Uninterruptible Power Supply (UPS) (Home Use)	14	14	-	-	14	
68	Vertikal Blind	1	1	-	-	1	
69	Water Mater	7	7	-	-	7	
70	Wireless	3	3	-	-	3	
71	Head Set	1	1	-	-	1	
72	Modem	1	1	-	-	1	
73	Software Sistem Informasi Aset Daerah	1	1	-	-	1	
74	Software Sistem Informasi Persediaan Bahan Habis Pakai	1	1	-	-	1	
75	tangga	2	2	-	-	2	
76	filling Cabinet kayu	2	2	-	-	2	
77	meja 1/2 Biro motif	27	27	-	-	27	
78	kursi plastik	5	5	-	-	5	
79	ac	14	13	-	1	14	
80	bak sampah	2	2	-	-	2	
81	kursi besi panjang	2	2	-	-	2	
82	rak besi	4	4	-	-	4	
83	meja berkas	5	5	-	-	5	
84	sofa 1 set	1	1	-	-	1	
85	sofa 1/2 set	1	1	-	-	1	
86	komputer	1	-	-	1	1	
87	lemari berkas kayu	1	1	-	-	1	
88	lemari berkas	6	5	-	1	6	
89	kursi almunium	1	1	-	-	1	
90	kursi kayu	9	9	-	-	9	
91	meja pimpinan	1	1	-	-	1	
92	kursi pimpinan	2	2	-	-	2	
93	meja kaca	1	1	-	-	1	

Sumber data: Bendahara Barang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang merupakan lembaga yang dibentuk khusus untuk mengelola keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. BKAD bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan aset mulai dari proses penyusunan anggaran hingga pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tugas utamanya meliputi pelaksanaan pelayanan administratif serta kegiatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, BKAD bertugas menyiapkan bahan dan kebijakan, seperti pedoman penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan, serta pelaporan keuangan OPD. Selain itu, BKAD juga melakukan pembinaan teknis dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Di sisi pengelolaan aset, BKAD memberikan pedoman penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah, pemeliharaan aset, penatausahaan, dan pembinaan pengelolaan aset pemerintah kota. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keberhasilan kinerja pelayanan BKAD selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan regulasi, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan perubahan selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta beberapa peraturan teknis terkait kode klasifikasi dan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, semua program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dilaksanakan oleh BKAD harus selalu mengacu pada peraturan tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan pelaksanaan program ini juga sangat bergantung pada dukungan sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga mampu mendukung pencapaian target dan sasaran sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Pemerintah Daerah Kota Kupang.

Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada Tahun Ke -				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(11)	(12)	(13)	(8)	(9)	(16)	(17)	(19)	(10)	(11)
1	Opini BPK atas laporan keuangan			Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai Sistem Akuntabilis Pemerintah Daerah (SAKIP)			Nilai	B	B	BB	BB	BB	B	B	B	B	BB	100%	100%	99.43%	99.43%%	100%

Sumber data: LHP BPK dan LHE SAKIP APIP

Berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah, capaian kinerja menunjukkan tren yang relatif baik dan konsisten sepanjang periode 2020–2024. Pada indikator **Opini BPK atas Laporan Keuangan**, target Renstra menetapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun. Hasil realisasi juga menunjukkan konsistensi dengan capaian opini WTP dari tahun 2020 hingga 2024 tanpa adanya perubahan. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga kualitas pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Rasio capaian indikator ini stabil pada angka 100% setiap tahun, yang menggambarkan kinerja keuangan daerah yang solid, berkesinambungan, dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Sementara itu, pada indikator **Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**, target yang ditetapkan adalah peningkatan kualitas penilaian dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 hingga 2023, nilai SAKIP masih berada pada kategori B, namun mengalami peningkatan menjadi BB pada tahun 2024. Perubahan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, khususnya pada aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, serta capaian kinerja yang berorientasi hasil. Rasio capaian indikator ini berada pada kisaran 100% hingga 99,43%, yang meskipun sedikit berfluktuasi, tetap memperlihatkan tren positif dan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja.

Selain kedua indikator tersebut, BKAD juga memperoleh capaian kinerja lain yang mencerminkan dinamika pengelolaan keuangan daerah. **Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)** Pemerintah Kota Kupang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, yaitu pada tahun 2021 memperoleh predikat B (Perlu Perbaikan), meningkat menjadi A (Baik) pada 2022, namun kembali turun ke B (Perlu Perbaikan) pada 2023. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah sudah dikelola dengan baik, tetapi masih terdapat aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, terutama terkait optimalisasi kondisi keuangan daerah. Di sisi lain, **Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD)** menunjukkan tren yang sangat positif. Dalam empat tahun terakhir, capaian IETPD meningkat signifikan, dari predikat Maju pada 2021, naik menjadi Digital pada 2022, dan berhasil dipertahankan hingga 2024. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Kota Kupang memberikan perhatian serius terhadap reformasi birokrasi, khususnya dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kupang melalui BKAD berhasil menjaga kualitas laporan keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten, meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan nilai SAKIP, serta memperlihatkan kemajuan dalam digitalisasi keuangan melalui IETPD. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan, terutama dalam menjaga stabilitas IPKD yang sempat mengalami penurunan, sehingga diperlukan strategi perbaikan yang lebih fokus pada penguatan pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital agar kinerja yang sudah baik dapat ditingkatkan menuju tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut tentunya tidak lepas dari besaran biaya yang dialokasikan dalam belanja daerah. Alokasi anggaran menjadi salah satu faktor penentu dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan BKAD secara optimal. Besaran biaya yang tersedia mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya finansial yang memadai guna menunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efektif dan efisien. Dengan melihat rincian belanja daerah selama periode 2021 hingga 2024, dapat dianalisis pola alokasi anggaran serta efektivitas penggunaannya dalam mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga menjadi indikator penting untuk menilai hubungan antara alokasi anggaran dan realisasi kinerja BKAD.

Tabel 2.6 Alokasi Belanja Daerah Tahun 2021-2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Uraian	Anggaran pada tahun ke-				Realisasi pada tahun ke-				Rasio Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	91.337.511.930,00	34.648.050.344,00	31.543.510.896,00	35.624.234.198,66	67.844.260.025,00	22.084.547.064,00	22.961.080.572,00	27.458.271.422,00	74,28	63,74	72,79	77,08	-0,87	-0,35
- Belanja Operasi	10.608.734.590,00	20.689.095.672,00	20.993.348.612,00	25.604.031.930,82	10.316.523.579,00	18.666.826.964,00	18.873.205.764,00	23.814.013.391,00	97,25	90,23	89,90	93,01	-0,20	-0,83
- Belanja Pegawai	3.857.606.400,00	4.310.113.576,00	3.605.697.431,00	5.772.774.794,82	3.993.559.223,00	4.205.001.233,00	3.146.888.914,00	5.250.480.197,00	103,52	97,56	87,28	90,95	-0,50	-0,69
- Belanja Barang dan Jasa	6.751.128.190,00	16.378.982.096,00	17.387.651.181,00	19.831.257.136,00	6.322.964.356,00	14.461.825.731,00	15.726.316.850,00	18.563.533.194,00	93,66	88,30	90,45	93,61	-0,02	-0,87
Belanja Modal	377.181.850,00	829.370.981,00	550.162.284,00	268.225.947,84	375.782.350,00	632.103.000,00	503.305.890,00	187.616.738,00	99,63	76,21	91,48	69,95	-0,76	-0,85
- Belanja Modal Peralatan dan mesin	285.681.850,00	829.370.981,00	550.162.284,00	268.225.947,84	284.332.350,00	632.103.000,00	503.305.890,00	187.616.738,00	99,53	76,21	91,48	69,95	-0,69	-0,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.500.000,00	-	-	-	91.450.000,00	-	-	-	99,95	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Belanja Tidak Terduga	80.351.595.490,00	13.129.583.691,00	10.000.000.000,00	9.751.976.320,00	57.151.954.096,00	2.785.617.100,00	3.584.568.918,00	3.456.641.293,00	71,13	21,22	35,85	35,45	-0,96	0,45
- Belanja Tidak Terduga	80.351.595.490,00	13.129.583.691,00	10.000.000.000,00	9.751.976.320,00	57.151.954.096,00	2.785.617.100,00	3.584.568.918,00	3.456.641.293,00	71,13	21,22	35,85	35,45	-0,96	0,45

Sumber data: Bidang Akuntansi dan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

Belanja daerah selama periode 2021–2024 menunjukkan tren yang cukup fluktuatif, baik dari sisi anggaran maupun realisasi. Anggaran belanja daerah menurun tajam dari Rp. 91,33 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp. 31,54 miliar pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat menjadi Rp. 35,62 miliar pada tahun 2024. Hal yang sama juga terjadi pada realisasi belanja, di mana pada tahun 2021 mencapai Rp. 67,84 miliar, namun menurun pada 2022 dan 2023, lalu meningkat lagi pada 2024 hingga Rp. 27,45 miliar. Meskipun demikian, rasio realisasi terhadap anggaran relatif stabil, berkisar antara 63,74% hingga 77,08%, dengan rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar -0,87 dan realisasi sebesar -0,35 yang menunjukkan tren penurunan.

Dari sisi komponennya, belanja operasi mendominasi struktur belanja daerah. Anggaran belanja operasi terus meningkat dari Rp. 10,60 miliar pada 2021 menjadi Rp. 25,60 miliar pada 2024, dengan realisasi yang juga stabil tinggi, di atas Rp. 10 miliar hingga Rp. 23,81 miliar. Rasio realisasi belanja operasi terhadap anggaran berada di atas 89%, bahkan mencapai 97,25% pada tahun 2021, menandakan konsistensi pelaksanaan. Subkomponen belanja operasi didominasi oleh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Belanja pegawai menunjukkan fluktuasi, di mana anggaran sempat menurun pada 2023 namun naik signifikan di 2024, dengan realisasi yang cukup tinggi (87–103%). Sementara itu, belanja barang dan jasa cenderung meningkat setiap tahun dengan realisasi rata-rata di atas 88%.

Berbeda dengan belanja operasi, belanja modal relatif kecil porsinya terhadap total belanja. Anggaran belanja modal berfluktuasi dari Rp. 377 juta pada 2021 menjadi Rp. 829 juta pada 2022, lalu menurun hingga Rp. 268 juta pada 2024. Realisasi belanja modal juga menurun, dengan rasio realisasi yang cukup variatif, dari 99,63% pada 2021 hingga 69,95% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal kurang menjadi prioritas dibandingkan belanja operasi. Sementara itu, belanja tidak terduga mencatat porsi terbesar pada tahun 2021 (Rp. 80,35 miliar) akibat kemungkinan penanganan kondisi darurat (misalnya pandemi), tetapi mengalami penurunan drastis pada tahun-tahun berikutnya hingga Rp. 9,75 miliar pada 2024. Realisasi belanja tidak terduga juga rendah, terutama pada tahun 2022 hanya sebesar 21,22% dari anggaran, dan stabil sekitar 35% pada tahun 2023–2024.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa kebijakan belanja daerah lebih diarahkan pada pemenuhan belanja operasi, terutama belanja pegawai serta barang dan jasa yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Rendahnya realisasi belanja modal dapat menjadi catatan penting karena terkait langsung dengan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, belanja tidak terduga hanya dimanfaatkan pada saat tertentu, sehingga realisasi sangat rendah dibandingkan anggarannya. Dengan rata-rata pertumbuhan negatif baik dari sisi anggaran maupun realisasi, diperlukan strategi penganggaran yang lebih efisien dan realistis agar rasio realisasi terhadap anggaran dapat lebih optimal serta mendorong peningkatan kualitas belanja pembangunan.

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Badan Keuangan dan Aset Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi yakni Kepala Daerah, DPRD, Perangkat Daerah, BPK, APIP dan Masyarakat.

2.1.5. Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah

Kerjasama daerah yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang ialah kerjasama dengan Bank RKUD terkait implementasi *Cash Management System* (CMS) dan SP2D Online, serta Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

2.2. Identifikasi Permasalahan pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek fundamental dalam pelaksanaan otonomi daerah yang harus dilakukan secara sistematis, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berperan sebagai instrumen strategis dalam merencanakan dan mengendalikan seluruh aktivitas keuangan pemerintah daerah. APBD disusun berdasarkan musyawarah antara pemerintah daerah dan DPRD, lalu ditetapkan melalui peraturan daerah yang mengikat secara hukum. Dengan demikian, APBD memiliki posisi sentral dalam upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kapabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang juga sejalan dengan prinsip good governance dan akuntabilitas fiskal yang digaungkan dalam forum-forum internasional, seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan kerangka kerja reformasi birokrasi.

Saat ini, pemerintah daerah telah bertransformasi dari sistem anggaran tradisional menuju sistem anggaran berbasis kinerja (*Performance Budgeting System*), yang menitikberatkan pada pencapaian keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). Sistem ini bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah tidak hanya fokus pada realisasi anggaran secara kuantitatif, melainkan juga kualitas dan dampak dari program yang dilaksanakan. Namun, optimalisasi pengelolaan keuangan di perangkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain seringnya perubahan regulasi yang harus cepat diadopsi, serta keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini sejalan dengan tantangan nasional terkait adaptasi regulasi keuangan negara dan

daerah, serta kebutuhan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa seluruh proses mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, pengendalian, hingga pelaporan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks otonomi daerah, BKAD dituntut untuk melakukan inovasi dan kreativitas dalam mengelola sumber daya daerah, baik melalui optimalisasi potensi pendapatan asli daerah maupun pemanfaatan aset daerah secara maksimal. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah guna mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, sebagaimana tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang.

Untuk memastikan target dan capaian kinerja organisasi dapat tercapai dengan optimal, diperlukan analisis mendalam terhadap kondisi lingkungan baik internal maupun eksternal yang memengaruhi kinerja tersebut. Salah satu metode yang efektif digunakan dalam menganalisis kondisi ini adalah analisis SWOC, yang mengidentifikasi kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weaknesses*), peluang (*Opportunities*), dan tantangan (*Challenges*) yang dihadapi oleh organisasi. Dengan pendekatan ini, BKAD dapat merumuskan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang ada, sehingga perencanaan strategis yang disusun menjadi lebih terarah, realistis, dan responsif terhadap dinamika lingkungan.

Melalui analisis SWOC (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Challenges*), BKAD dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Dengan pemahaman ini, BKAD dapat merumuskan strategi adaptif dan inovatif dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan dan aset, sehingga mampu mendukung pencapaian target pembangunan daerah dan kinerja organisasi secara optimal.

1. Faktor Internal:

a. Kekuatan (*Strengths*)

1. Komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi.

2. Ketersediaan sistem informasi keuangan meskipun belum optimal (pondasi awal sudah ada).
3. Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelayanan keuangan dan aset.
4. Tersedianya SDM dasar bidang keuangan dan aset yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan.

b. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Belum optimalnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis teknologi, yang menyebabkan keterlambatan dan ketidakakuratan laporan.
2. Ketidaksesuaian pengelolaan keuangan dengan standar akuntansi pemerintah.
3. Lemahnya mekanisme pengawasan internal yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan anggaran.
4. Inventarisasi aset daerah yang tidak akurat dan tidak mutakhir karena minimnya pemanfaatan teknologi.
5. Rendahnya kompetensi SDM dalam penguasaan teknologi informasi.
6. Kurangnya budaya kerja inovatif dan responsif terhadap perubahan kebijakan dan teknologi.
7. Kualitas layanan publik masih rendah, belum memenuhi harapan masyarakat dari segi kecepatan dan transparansi.

2. Faktor Eksternal:

a. Kesempatan/Peluang (*Oportunities*)

1. Kemajuan teknologi digital yang dapat digunakan untuk mendorong efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset.
2. Dukungan regulasi nasional terkait digitalisasi dan transparansi keuangan daerah.
3. Potensi pemanfaatan aset idle sebagai sumber PAD tambahan.
4. Kebutuhan masyarakat akan layanan digital dan online yang cepat, terintegrasi, dan transparan.
5. Program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi ASN dari pusat maupun swasta.
6. Dukungan dari sektor swasta atau pihak ketiga dalam pengembangan platform layanan publik online.

b. Tantangan (*Challengges*)

1. Rendahnya minat dan akses terhadap pelatihan dan sertifikasi profesional.

2. Kurangnya pengelolaan terhadap aset idle yang berpotensi menghasilkan pendapatan daerah.
3. Kurangnya platform layanan berbasis online yang terintegrasi, sehingga akses masyarakat terbatas.
4. Tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah akibat lemahnya komunikasi dan responsivitas aparatur.
5. Resistensi terhadap perubahan dan adopsi teknologi baru di kalangan pegawai.
6. Tuntutan publik terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional.

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap faktor internal dan eksternal, terdapat sejumlah faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors/CSF*) yang harus menjadi fokus utama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah secara efisien, transparan, dan akuntabel yakni, sebagai berikut:

1. Komitmen kuat dari pimpinan daerah dan seluruh jajaran birokrasi merupakan landasan utama keberhasilan transformasi sistem pengelolaan keuangan dan aset. Komitmen ini harus diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang progresif serta dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung digitalisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Penguatan kapasitas dan kompetensi ASN, khususnya dalam penguasaan teknologi informasi dan manajemen keuangan daerah, menjadi faktor esensial. Keberhasilan program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesional akan sangat menentukan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem informasi keuangan dan menghadapi perubahan kebijakan.
3. Keberadaan dan pengembangan sistem informasi keuangan dan manajemen aset yang terintegrasi secara optimal harus menjadi prioritas. Sistem ini harus mudah digunakan, akurat, dan mendukung proses pengambilan keputusan secara real-time, serta mampu mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.
4. Penguatan pengawasan internal dan budaya kerja yang adaptif terhadap perubahan juga menjadi kunci. Mekanisme kontrol yang kuat akan meminimalkan risiko penyalahgunaan anggaran, sementara budaya kerja yang inovatif dan responsif akan mempercepat proses reformasi birokrasi.
5. Keberhasilan juga sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan peluang eksternal, seperti kemitraan dengan sektor swasta dalam pengembangan platform layanan publik digital, serta dukungan regulasi nasional yang mendorong transparansi dan efisiensi.

6. Peningkatan komunikasi publik dan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat menjadi penentu keberhasilan jangka panjang. Pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis teknologi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mendukung keberlangsungan reformasi.

Dengan memperhatikan faktor-faktor kunci tersebut secara konsisten dan terukur, pemerintah daerah akan mampu mendorong tata kelola keuangan dan aset yang modern, efisien, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

1. Analisis Faktor Internal

Faktor internal mencerminkan kondisi, kapasitas, dan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi atau pemerintah daerah saat ini yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset. Faktor ini terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu kekuatan (*strengths*) yang menjadi modal positif untuk mendorong perubahan dan pencapaian tujuan, serta kelemahan (*weakness*) yang merupakan hambatan atau keterbatasan internal yang perlu diperbaiki agar tidak mengganggu kinerja organisasi. Analisis terhadap faktor internal ini penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana kesiapan internal dalam mendukung reformasi tata kelola keuangan dan aset berbasis teknologi serta peningkatan pelayanan publik secara keseluruhan.

a. Kekuatan/Potensi (*Strengths*)

Pemerintah daerah menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi, yang menjadi fondasi utama bagi transformasi digital. Selain itu, meskipun sistem informasi keuangan yang ada belum sepenuhnya optimal, keberadaannya menjadi pondasi awal yang penting untuk ditingkatkan. Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan juga menjadi kekuatan budaya organisasi yang dapat mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Ditambah lagi, tersedianya sumber daya manusia dasar di bidang keuangan dan aset membuka peluang untuk peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pengembangan, sehingga SDM tersebut dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan era digitalisasi pemerintahan.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Meskipun sudah tersedia sistem informasi keuangan, penerapannya belum optimal, menyebabkan keterlambatan serta ketidakakuratan laporan yang menghambat pengambilan keputusan. Pengelolaan keuangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga menjadi kelemahan serius yang dapat berdampak pada opini audit. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan internal membuka celah penyalahgunaan anggaran, yang menunjukkan perlunya penguatan fungsi pengendalian intern. Pengelolaan aset pun menghadapi persoalan, seperti inventarisasi yang tidak akurat akibat minimnya pemanfaatan teknologi. Kompetensi SDM dalam bidang teknologi informasi juga masih rendah, ditambah dengan budaya kerja yang kurang inovatif dan tidak responsif terhadap perubahan kebijakan serta teknologi. Semua kelemahan ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas layanan publik yang belum memenuhi ekspektasi masyarakat dari segi kecepatan dan transparansi.

2. Analisis Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan kondisi atau dinamika di luar organisasi yang dapat memengaruhi kinerja dan arah kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset. Faktor ini terbagi menjadi dua aspek, yaitu peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong kemajuan dan inovasi, serta tantangan (*Challenges*) yang dapat menjadi hambatan jika tidak diantisipasi dengan baik. Analisis terhadap faktor eksternal membantu pemerintah daerah memahami tren teknologi, kebijakan nasional, kebutuhan masyarakat, serta potensi kerja sama dengan pihak ketiga, sekaligus mengidentifikasi risiko-risiko eksternal yang perlu direspons secara strategis agar tidak menghambat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

a. Peluang (*Opportunities*)

Kemajuan teknologi digital saat ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah. Dukungan regulasi nasional yang mendorong digitalisasi dan transparansi keuangan daerah juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah untuk melakukan reformasi dan inovasi berbasis teknologi. Selain itu, aset daerah yang selama ini tidak dimanfaatkan secara optimal (*idle*) memiliki potensi besar untuk menjadi sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika dikelola dengan tepat. Masyarakat juga menunjukkan kebutuhan tinggi terhadap layanan digital yang cepat, terintegrasi, dan transparan, yang sejalan dengan arah transformasi digital pemerintahan. Kesempatan lain datang dari program pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi ASN yang disediakan baik oleh pemerintah pusat maupun sektor swasta. Terakhir, adanya potensi kemitraan dengan pihak swasta dalam pengembangan platform layanan publik

juga dapat dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi digital tanpa membebani anggaran daerah secara signifikan.

b. Tantangan (*Challenges*)

Di tengah peluang yang besar, terdapat tantangan signifikan yang perlu diantisipasi. Salah satunya adalah rendahnya minat dan akses ASN terhadap pelatihan dan sertifikasi profesional, yang berakibat pada stagnasi kapasitas aparatur dalam menghadapi era digital. Pengelolaan aset idle yang belum optimal juga menjadi hambatan dalam meningkatkan PAD. Selain itu, kurangnya integrasi dalam platform layanan online menyebabkan keterbatasan akses masyarakat terhadap layanan pemerintah yang efisien. Tingkat kepuasan masyarakat yang masih rendah menunjukkan kelemahan dalam komunikasi dan responsivitas aparatur, yang jika tidak segera dibenahi akan berdampak pada menurunnya kepercayaan publik. Resistensi terhadap perubahan dan adopsi teknologi baru di kalangan pegawai juga menjadi tantangan utama dalam mendorong transformasi digital. Di sisi lain, tingginya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional menambah tekanan terhadap birokrasi, yang harus segera berbenah untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2.2.1. Permasalahan pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Orientasi dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang merupakan proses perencanaan yang memuat arah dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Orientasi ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan internal maupun eksternal, sehingga mampu menjadi pedoman yang responsif, kreatif, dan inovatif dalam menghadapi dinamika perubahan di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Dalam konteks tersebut, BKAD Kota Kupang menetapkan sejumlah permasalahan dan isu strategis yang menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan kemandirian Pemerintah Kota Kupang. Isu-isu strategis ini mencerminkan tantangan sekaligus peluang yang harus direspons melalui kebijakan dan program yang tepat guna, demi tercapainya tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adapun permasalahan dan isu strategis dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7 Teknik Merumuskan Isu Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELAVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELAVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset berbasis teknologi	Belum optimalnya penerapan sistem informasi keuangan daerah berbasis teknologi, sehingga laporan keuangan tidak selalu tepat waktu dan akurat.		Implementasi desentralisasi yang memberikan kewenanga lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal ini pengelolaan keuangan. Tantangan globalnya adalah menjaga efisiensi akuntabilitas dan pemerataan fiskal ditengah ekonomi yang luas.	Rendahnya kontribusi PAD	Rendahnya PAD, dimana struktur pendapatan daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer	Percepatan penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan dan aset untuk menghadapi tuntutan era digital.
Ketersediaan sistem informasi keuangan meskipun belum optimal (pondasi awal sudah ada).	Masih ditemukan ketidaksesuaian antara pengelolaan keuangan dan standar akuntansi pemerintah.		Dorongan global terhadap open government dan open budget menuntut daerah untuk mempublikasikan anggaran, belanja, dan kinerja secara transparan	Belanja Daerah cenderung lebih besar untuk belanja rutin	Terdapat in-efisiensi dalam struktur belanja daerah, yang mana belanja pegawai dan operasional tukin masih mendominasi penggunaan anggaran, sementara belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik proposinya cenderung lebih kecil	Penekanan pada pelaporan real-time untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELAVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELAVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelayanan keuangan dan aset	Lemahnya mekanisme pengawasan internal, sehingga rawan terjadi penyalahgunaan anggaran dan korupsi.		Pemerintah daerah di dorong untuk mengalokasikan dan pengelola anggaran yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah (TPB/SDGs)	Masih ditemukan praktek copy paste anggaran, perencanaan yang tidak berbasis data, serta lemahnya sinergi antara perencanaan dan penganggaran	Perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dan selaras.	Pengelolaan Aset Berbasis Keberlanjutan: Pendekatan ramah lingkungan dan berorientasi pembangunan jangka panjang.
Tersedianya SDM dasar bidang keuangan dan aset yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan	Inventarisasi aset daerah belum sepenuhnya akurat dan mutakhir karena minimnya pemanfaatan teknologi modern.		Banyak daerah dalam negara berkembang menghadapi masalah ketergantungan pada pemerintah pusat, rendahnya kapasitas pemungutan pajak, dan minimnya sumber PAD	Masih maraknya praktek korupsi di tingkat daerah terutama dalam pengadaan barang, jasa dan belanja modal	Implementasi SIPD belum maksimal dikarenakan adanya kendala teknis seperti keterbatasan SDM, jaringan internet, dan pelatihan terkait SIPD belum dimanfaatkan secara optimal	Kebutuhan akan profesionalisme tinggi dengan kemampuan teknologi digital terkini.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELAVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELAVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal.			Banyak daerah belum maksimal dalam implementasi SIPD karena keterbatasan SDM dan Infrastruktur	Minimnya inovasi pembiayaan pembangunan daerah dalam hal ini Kota Kupang belum memanfaatkan skema seperti kerja sama pemerintah dengan Badan Usaha, Obligasi daerah, atau Pembiayaan alternatif lain yang dapat meminimalkan beban APBD	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELAVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELAVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kurangnya pengelolaan terhadap aset idle yang seharusnya dapat menghasilkan pendapatan tambahan bagi daerah.			Sebagian besar daerah telah meraih WTP, kualitas substansi laporan keuangan dan pertanggungjawaban APBD masih menjadi sorotan	Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah masih menjadi catatan penting. Meskipun laporan keuangan beberapa kali mendapatkan OPINI WTP dari BPK, kualitas pengawasan baik internal maupun eksternal masih lemah. Dan partisipasi publik dalam proses penganggaran dan pengawasan masih rendah, serta resiko penyimpangan anggaran masih mungkin terjadi karena belum kuatnya sistem pengendalian dan integritas dalam pengelolaan keuangan.	

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELAVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELAVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan dan aset masih terbatas, terutama dalam penguasaan teknologi informasi.			Terdapat kesenjangan yang besar antara daerah kaya dan daerah miskin, baik dari segi PAD maupun kapasitas Belanja		
	Rendahnya minat dan akses aparatur terhadap pelatihan dan sertifikasi profesional di bidang keuangan dan aset.					
	Kurangnya budaya kerja yang inovatif dan responsif terhadap perubahan kebijakan dan perkembangan teknologi.					

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELAVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELAVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kualitas layanan publik di bidang keuangan dan aset masih belum memenuhi harapan masyarakat, baik dari segi kecepatan maupun transparansi.					Kebutuhan akan profesionalisme tinggi dengan kemampuan teknologi digital terkini.
	Kurangnya platform layanan berbasis <i>online</i> yang terintegrasi, sehingga akses masyarakat menjadi terbatas.					
	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah akibat kurangnya komunikasi dan responsivitas dari aparatur.					

Keterangan: Hasil olahan BKAD, 2025

Dalam konteks tersebut, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang perlu terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan *stakeholders* terkait. Pendekatan yang terintegrasi dan responsif terhadap kondisi global, nasional, dan lokal menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset yang transparan, akuntabel, dan berdaya guna dalam mendukung visi pembangunan Kota Kupang ke depan.

BAB III

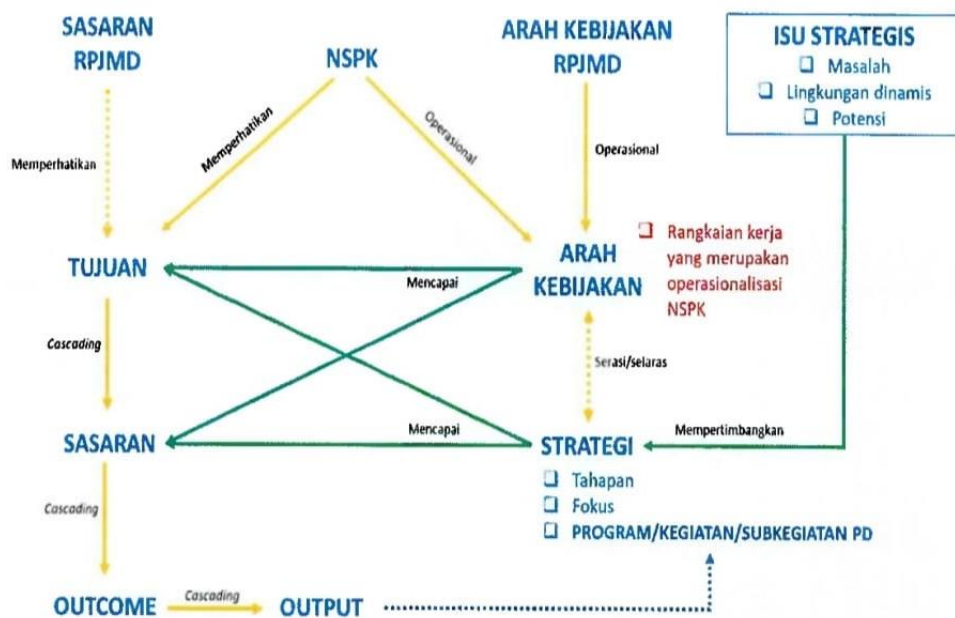
TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Bukan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang mempunyai tujuan yang harus dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis tentang kinerja dimasa lalu dan yang akan dicapai di masa mendatang. Dimana tujuan yang ingin dicapai yaitu semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

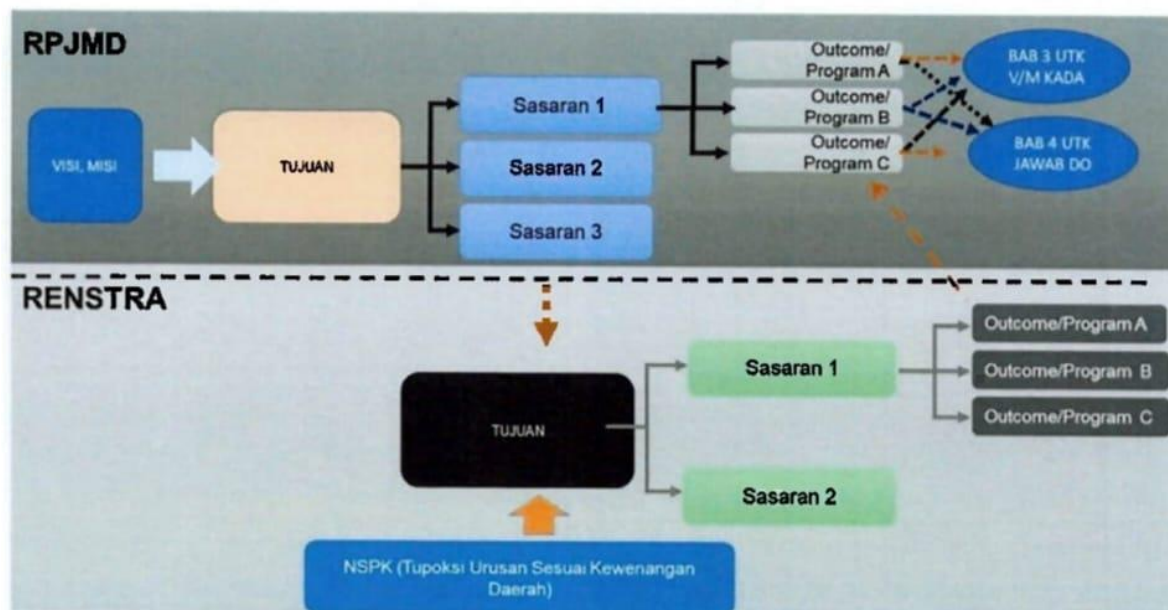
Konsep Rencana Strategis Badan Keuangan dan Aset daerah dan keterkaitan Sasaran RPJMD Kota Kupang dengan tujuan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3.1 Konsep Rencana Strategis BKAD



Sumber data: Inmendagri 25 Tahun 2025

Gambar 3.2 Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra
Badan Keuangan dan Aset Daerah



Sumber data: Inmendagri 25 Tahun 2025

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang memiliki tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan yaitu:

Tujuan:

“Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif berbasis digital.”

Sasaran:

- Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Daerah.
- Meningkatnya efesiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis Digital.
- Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produltif dan bernilai tambah.

Kota Kupang berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA KUPANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVA N	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETE RAN GAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah											
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif berbasis digital		Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
			Indeks pengelolaan keuangan daerah (predikat) (Nilai)	B	B	A	A	A	A	A	
			Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	5,14	5,14	5,15	5,15	5,16	5,17	5,17	
			Indeks elektronifikasi transaksi pemda (e-TPD) (Indeks)	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	
			Nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD (Persentase)	9	9	10	10	15	15	20	
	Meningkatnya kualitas		Skor Kesesuaian Dokumen	11,03	11,03	12,03	13,03	13,03	14,03	14,03	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah											
		pengelolaan keuangan daerah	Perencanaan Dan Penganggaran (Skor)								
			Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (Nilai)	15	15	16	17	17	18	18	
			Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan (Nilai)	13,70	13,70	13,70	14	14,50	15	15	
			Nilai Penyerapan Anggaran (Nilai)	13,70	13,70	14,70	15,70	15,70	16,70	17,70	
			Nilai Kondisi Keuangan Daerah (Nilai)	13,33	13,33	13,66	13,66	14	14	14,33	
		Meningkatnya efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digital	Nilai Aspek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Nilai)	100	100	100	100	100	100	100	
			Nilai Aspek Realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Nilai)	67,50	72,50	77,50	82,50	87,50	92,50	97,50	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah											
			Nilai Aspek Lingkungan Strategis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Nilai)	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah	Persentase Aset Tanah Yang Bersertifikat (Persentase)	57,24	57,24	58	58	58	59	59	

Keterangan: Hasil olahan BKAD, 2025

3.2. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang menetapkan strategi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan sebelumnya. Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada, seperti tersedianya kualitas sumber daya aparatur dan komitmen yang tinggi. Selanjutnya, meminimalisir faktor kelemahan internal seperti kemampuan teknis fungsional, beban kerja yang belum terstandarisasi, serta sarana prasarana yang masih belum memadai. Di sisi lain, BKAD juga mencari solusi untuk mengantisipasi ancaman masa depan, antara lain pengaruh globalisasi, perbedaan persepsi dalam membaca peraturan dengan pemeriksa, keterbukaan informasi yang semakin luas, serta perubahan peraturan yang sangat cepat.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan juga mampu mensinergikan lingkungan strategis dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks agar dapat disederhanakan dalam penanganan yang sistematis.

Berdasarkan analisis kekuatan, kelemahan, dan ancaman yang ada serta kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan, maka dirumuskan strategi-strategi konkret yang harus dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan serta pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset daerah. Strategi tersebut antara lain:

1. Implementasi sistem informasi keuangan berbasis elektronik untuk meningkatkan aksesibilitas dan akurasi laporan.
2. Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal melalui pemanfaatan teknologi.
3. Pengembangan dashboard pelaporan keuangan *real time*.
4. Digitalisasi inventarisasi aset daerah untuk meningkatkan akurasi dan keterbaruan data.

5. Penyusunan rencana strategis pemanfaatan aset daerah berbasis kebutuhan pembangunan.
6. Penerapan sistem lelang elektronik untuk aset tidak produktif.
7. Pelaksanaan pelatihan berkelanjutan berbasis kebutuhan kompetensi.
8. Pemberian insentif kepada aparatur yang memiliki sertifikasi profesional di bidang keuangan dan aset.
9. Penyediaan platform *e-learning* untuk meningkatkan akses pelatihan.
10. Optimalisasi layanan berbasis online untuk mempermudah akses masyarakat.
11. Pengembangan mekanisme feedback masyarakat terhadap layanan publik di bidang keuangan dan aset.
12. Peningkatan kapasitas *frontliner* dalam melayani masyarakat.

3.3. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka merumuskan arah program dan kegiatan yang tepat sasaran, diperlukan pendekatan strategis yang mensinergikan hasil identifikasi lingkungan internal dan eksternal melalui *Internal Factors Analysis Summary* (IFAS) dan *Exeternal Factors Analysis Summary* (EFAS). Sinergi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang saling berkaitan dan berkontribusi terhadap keberhasilan maupun kegagalan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pendekatan ini juga mempertimbangkan *Critical Success Factors* (CSF) sebagai elemen kunci dalam mencapai tujuan strategis perangkat daerah.

Melalui analisis IFAS dan EFAS, ditemukan sejumlah *leverage points* atau titik daya ungkit yang dapat digunakan untuk menyederhanakan permasalahan kompleks menjadi intervensi kebijakan yang sistemik, terukur, dan berkelanjutan. Daya ungkit ini misalnya berupa optimalisasi sistem informasi keuangan yang sudah tersedia, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berbasis teknologi, serta pemanfaatan aset idle menjadi sumber PAD baru.

Berdasarkan pemetaan tersebut, arah kebijakan yang dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran renstra antara lain, sebagai berikut:

1. Mewujudkan penggunaan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.
2. Penyusunan regulasi internal terkait mekanisme audit berbasis risiko.
3. Peningkatan kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat untuk peningkatan kualitas pengawasan.
4. Mengembangkan aplikasi manajemen aset daerah berbasis *cloud*.
5. Mendorong kerja sama dengan pihak swasta dalam optimalisasi aset daerah melalui mekanisme BOT (*Build Operate Transfer*).
6. Meningkatkan regulasi untuk mendukung percepatan pemanfaatan aset idle.
7. Penyusunan *roadmap* pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan aset.
8. Mendorong kerjasama dengan lembaga pelatihan bersertifikasi nasional maupun internasional.
9. Implementasi sistem penilaian kinerja berbasis indikator kompetensi.
10. Mengintegrasikan layanan publik ke dalam satu pintu melalui platform digital.
11. Peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik.
12. Penyediaan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk evaluasi layanan.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan serta relevansi dan konsistensi antar pernyataan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif berbasis digital	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Implementasi sistem informasi keuangan berbasis elektronik untuk meningkatkan aksesibilitas dan akurasi laporan	Mewajibkan penggunaan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.
	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas transaksi keuangan daerah berbasis digital	Penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal melalui pemanfaatan teknologi.	Penyusunan regulasi internal terkait mekanisme audit berbasis risiko.
	Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang produktif dan bernilai tambah	Pengembangan <i>dashboard</i> pelaporan keuangan <i>real time</i> .	Peningkatan kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat untuk peningkatan kualitas pengawasan.
		Digitalisasi inventarisasi aset daerah untuk meningkatkan akurasi dan keterbaruan data.	Mengembangkan aplikasi manajemen aset daerah berbasis <i>cloud</i> .
		Penyusunan rencana strategis pemanfaatan aset daerah berbasis kebutuhan pembangunan.	Mendorong kerja sama dengan pihak swasta dalam optimalisasi aset daerah melalui mekanisme BOT

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			(Build-Operate-Transfer).
		Penerapan sistem lelang elektronik untuk aset tidak produktif.	Meningkatkan regulasi untuk mendukung percepatan pemanfaatan aset <i>idle</i> .
		Pelaksanaan pelatihan berkelanjutan berbasis kebutuhan kompetensi.	Penyusunan roadmap pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan aset.
		Pemberian insentif kepada aparatur yang memiliki sertifikasi profesional di bidang keuangan dan aset.	Mendorong kerja sama dengan lembaga pelatihan bersertifikasi nasional maupun internasional.
		Penyediaan platform <i>e-learning</i> untuk meningkatkan akses pelatihan.	Implementasi sistem penilaian kinerja berbasis indikator kompetensi.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Optimalisasi layanan berbasis <i>online</i> untuk mempermudah akses masyarakat.	Mengintegrasikan layanan publik ke dalam satu pintu melalui platform digital.
		Pengembangan mekanisme <i>feedback</i> masyarakat terhadap layanan publik di bidang keuangan dan aset.	Peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik.
		Peningkatan kapasitas <i>frontliner</i> dalam melayani masyarakat.	Penyediaan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk evaluasi layanan.

Keterangan: Hasil Olahan BKAD, 2025

Penahapan renstra merupakan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang tahun 2026-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Prioritas utama yakni mempertahankan Opini WTP dari BPK, indeks Digital dari satgas P2DD dan predikat SAKIP dari APIP, kemudian meningkatkan indeks pengelolaan keuangan daerah, nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD, serta memperoleh indeks akses keuangan daerah dari TPAKD.	Prioritas utama yakni mempertahankan opini WTP dari BPK, indeks Digital dari satgas P2DD dan predikat SAKIP dari APIP, indeks pengelolaan keuangan daerah, nilai kontribusi aset daerah terhadap akses keuangan daerah dari TPAKD.	Prioritas utama yakni mempertahankan Opini WTP dari BPK, indeks Digital dari satgas P2DD, indeks pengelolaan keuangan daerah, kemudian meningkatkan predikat SAKIP, indeks akses keuangan daerah dari TPAKD, dan nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD	Prioritas utama yakni mempertahankan Opini WTP dari BPK, indeks Digital dari satgas P2DD, indeks pengelolaan keuangan daerah, predikat SAKIP, dan nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD, kemudian meningkatkan indeks akses keuangan daerah dari TPAKD, dan nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD	Prioritas utama yakni mempertahankan Opini WTP dari BPK, indeks Digital dari satgas P2DD, indeks pengelolaan keuangan daerah, predikat SAKIP, kemudian meningkatkan indeks akses keuangan daerah dari TPAKD, dan nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD

Keterangan: Hasil Olahan BKAD, 2025

Sinergi arah kebijakan perangkat daerah dengan arah kebijakan RPJMD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.4 Sinergi Arah Kebijakan Perangkat Daerah dengan Arah Kebijakan RPJMD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		Meningkatkan sistem tata kelola anggaran, keuangan dan sistem akuntansi dan pelaporan, serta aset daerah	Mewujudkan penggunaan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan pemerintah pusat.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2		Ekstensifikasi dan intensifikasi aset daerah untuk peningkatan penerimaan daerah	Penyusunan regulasi internal terkait mekanisme audit berbasis risiko.	
3		Meningkatkan kualitas pengawasan keuangan dan aset daerah	Peningkatan kolaborasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat untuk peningkatan kualitas pengawasan.	
4		Penerapan sistem informasi keuangan dan aset daerah berbasis digital	Mengembangkan aplikasi manajemen aset daerah berbasis <i>cloud</i> .	
5			Mendorong kerja sama dengan pihak swasta dalam optimalisasi aset daerah melalui mekanisme BOT (<i>Build Operate Transfer</i>).	
6			Meningkatkan regulasi untuk mendukung percepatan pemanfaatan aset idle.	
7			Penyusunan <i>roadmap</i> pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan dan aset.	
8			Mendorong kerjasama dengan lembaga pelatihan bersertifikasi nasional maupun internasional.	
9			Implementasi sistem penilaian kinerja berbasis indikator kompetensi.	
10			Mengintegrasikan layanan publik ke dalam satu pintu melalui platform digital.	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11			Peningkatan alokasi anggaran untuk peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan publik.	
12			Penyediaan survei kepuasan masyarakat secara berkala untuk evaluasi layanan.	

Keterangan: Hasil Olahan BKAD, 2025

BAB IV

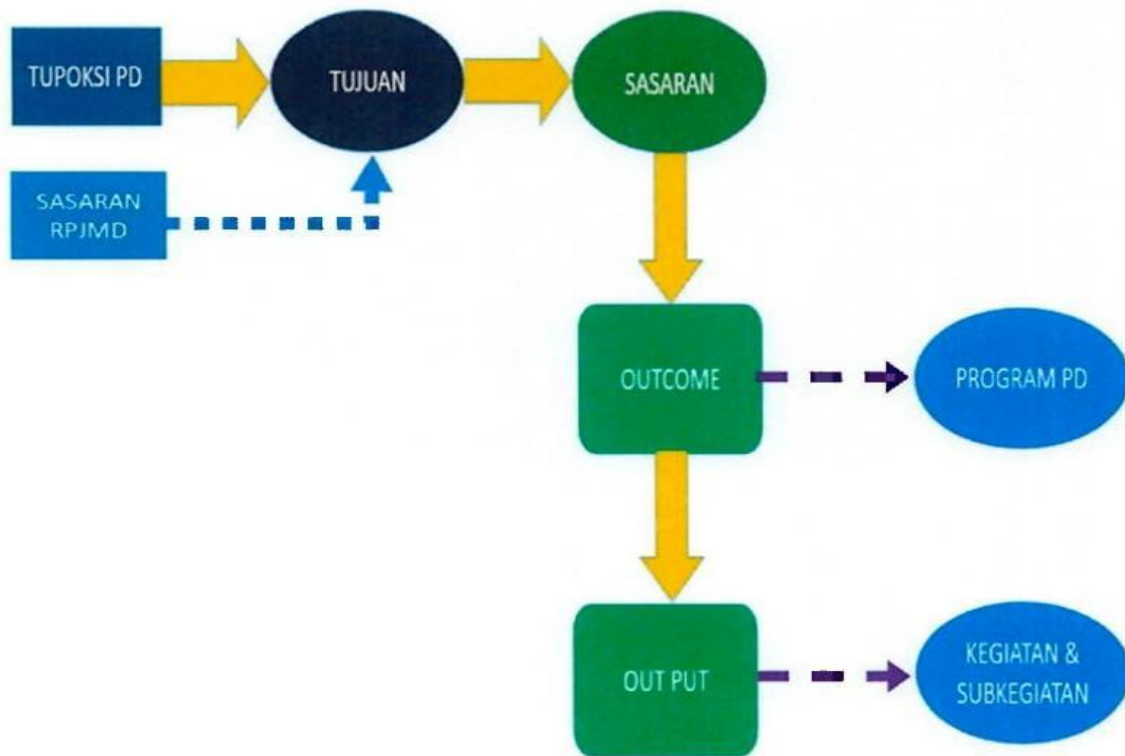
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang perlu menyusun langkah-langkah operasional secara sistematis. Langkah-langkah ini diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan indikatif yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan tugas dan fungsi BKAD sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan keuangan dan aset.

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan/atau masyarakat, dan dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah, sebagai bentuk upaya pencapaian sasaran terukur. Dalam pelaksanaannya, kegiatan mencakup serangkaian tindakan yang melibatkan pengerahan sumber daya, baik berupa personel, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari semuanya, yang digunakan sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa. Selanjutnya, sub kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang terdiri dari satu atau lebih aktivitas spesifik dan dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai bentuk operasionalisasi kegiatan utama secara lebih rinci. Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD



Sumber data: Inmendagri 2 Tahun 2025

Perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan, termasuk alokasi pendanaannya, telah dirumuskan oleh BKAD Kota Kupang untuk periode tahun 2025–2029. Rincian lengkap dari rencana tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini, yang menjadi acuan pelaksanaan dalam rangka mendukung efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan strategis organisasi selama lima tahun mendatang.

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KOTA KUPANG

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, efisien dan efektif	Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang professional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif berbasis digital				Opini BPK Atas Laporan Keuangan (Opini)		
					Indeks pengelolaan keuangan daerah (predikat) (Nilai)		
					Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)		
					Indeks elektronifikasi transaksi pemda (e-TPD) (Indeks)		
					Nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD (Persentase)		
	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah				Skor Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran (Skor)		
					Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD (Nilai)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan (Nilai)		
					Nilai Penyerapan Anggaran (Nilai)		
					Nilai Kondisi Keuangan Daerah (Nilai)		
			Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik		Persentase pengelolaan keuangan daerah yang baik (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Tersedianya Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
				Tersedianya Dokumen Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Kegiatan (Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	Lembaga Keuangan Bukan Bank	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
						Optimalisasi Kas	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Akuntansi dan	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
				Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET ERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					(Dokumen)	Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
				Terlaksana Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
				Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
		Meningkatnya efisiensi dan efektivitas transaksi keuangan daerah berbasis digital			Nilai Aspek Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Nilai)		
					Nilai Aspek Realisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Nilai)		
					Nilai Aspek Lingkungan Strategis Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Nilai)		
			Persentase Pengelolaan Keuangan		Persentase pengelolaan keuangan daerah yang baik (%)	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
			Daerah yang baik	Tersedianya Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
					Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
					Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
					Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	
					Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	
					Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.00.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
						Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
					Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
					Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
				Tersedianya Dokumen Perbendaharaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
				n Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					(Dokumen)		
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
					Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) (Laporan)	5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
					Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					(Laporan)		
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET ERANGA N
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Kabupaten/Kota (Dokumen)		
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
					Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
					Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
						Pemerintah Daerah	
					Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
					Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
				Terlaksana Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					(Laporan)		
					Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Dearah Bidang Keuangan Daerah	5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	
		Meningkatnya pengelolaan aset daerah yang			Persentase Aset Tanah Yang Bersertifikat (Persentase)		
					Persentase pengelolaan barang milik daerah yang baik (%)	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
		produktif dan bernilai tambah	Daerah yang Baik	Tersedianya Dokumen Pengelolaan BMD	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Kabupaten/Kota (Orang)		
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
					Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah							
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

Keterangan: Hasil Olahan BKAD, 2025

TABEL 4.2. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERA H	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02 - KEUANGAN					36.617.37 5.567,81		38.193.46 0.813,11		39.184.09 4.700,37		40.178.38 7.446,06		41.900.40 7.469,16			
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					22.632.46 0.576,93		23.606.60 7.047,75		24.218.89 7.853,73		24.833.45 0.126,25		25.897.79 5.936,98			
Predikat SAKIP Perangkat Daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah (Predikat)	B	BB	BB	22.632.46 0.576,93	A	23.606.60 7.047,75	A	24.218.89 7.853,73	A	24.833.45 0.126,25	A	25.897.79 5.936,98	5.02.0.00. 0.00.02.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					483.711.6 91,55		504.511.2 94,29		517.578.1 36,81		530.116.8 88,51		551.849.7 03,34			
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	2	2	2	483.711.6 91,55	2	504.511.2 94,29	2	517.578.1 36,81	2	530.116.8 88,51	2	551.849.7 03,34			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	(Dokumen)															
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	9	9		9		9		9		9				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERA H	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2				
5.02.01.2.01.00 01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					155.000.0 00,00		161.665.0 00,00		165.852.1 23,50		170.064.7 67,43		177.360.5 45,96		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	9	9	9	155.000.000,00	9	161.665.000,00	9	165.852.123,50	9	170.064.767,43	9	177.360.545,96			
5.02.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					59.600.000,00		62.162.800,00		63.772.816,52		65.392.646,06		68.197.990,58		KOTA KUPANG	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	59.600.000,00	2	62.162.800,00	2	63.772.816,52	2	65.392.646,06	2	68.197.990,58			
5.02.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					24.200.000,00		25.240.600,00		25.894.331,54		26.552.047,56		27.691.130,40		KOTA KUPANG	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen		2	2	24.200.000,00	2	25.240.600,00	2	25.894.331,54	2	26.552.047,56	2	27.691.130,40			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Perubahan RKA-SKPD	Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)															
5.02.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					45.400.000,00		47.352.200,00		48.578.621,98		49.812.518,98		51.949.476,04		KOTA KUPANG	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	45.400.000,00	2	47.352.200,00	2	48.578.621,98	2	49.812.518,98	2	51.949.476,04			
5.02.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					23.700.000,00		24.719.100,00		25.359.324,69		26.003.451,54		27.118.999,61		KOTA KUPANG	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2	2	2	23.700.000,00	2	24.719.100,00	2	25.359.324,69	2	26.003.451,54	2	27.118.999,61			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01.2.01.006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					175.811.691,55		183.371.594,29		188.120.918,58		192.291.456,94		199.531.560,75		KOTA KUPANG	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	2	175.811.691,55	2	183.371.594,29	2	188.120.918,58	2	192.291.456,94	2	199.531.560,75			
5.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					8.167.108.885,38		8.519.245.233,46		8.740.773.368,46		8.962.789.012,02		9.347.292.660,63			
Terlaksananya Administarsi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	0	0	1	8.167.108.885,38	1	8.519.245.233,46	1	8.740.773.368,46	1	8.962.789.012,02	1	9.347.292.660,63			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERAH	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)															
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	87	87	87		87		87		87		87				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	18		18		18		18		18				
5.02.01.2.02.001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					8.077.108.885,38		8.424.424.567,45		8.642.617.163,75		8.862.139.639,71		9.242.325.430,25		KOTA KUPANG	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	87	87	87	8.077.108.885,38	87	8.424.424.567,45	87	8.642.617.163,75	87	8.862.139.639,71	87	9.242.325.430,25			
5.02.01.2.02.004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					30.000.000,00		31.290.000,00		32.100.411,00		32.915.761,44		34.327.847,60		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	1	30.000.000,00	1	31.290.000,00	1	32.100.411,00	1	32.915.761,44	1	34.327.847,60			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	(Dokumen)															
5.02.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					20.000.000,00		20.860.000,00		21.400.274,00		21.943.840,96		22.885.231,74		KOTA KUPANG	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	1	20.000.000,00	1	20.860.000,00	1	21.400.274,00	1	21.943.840,96	1	22.885.231,74			
5.02.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					30.000.000,00		32.240.666,01		33.075.699,26		33.915.822,02		35.370.810,79		Alak	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	18	30.000.000,00	18	32.240.666,01	18	33.075.699,26	18	33.915.822,02	18	35.370.810,79			
5.02.01.2.02.008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					10.000.000,00		10.430.000,00		11.579.820,45		11.873.947,89		12.383.340,25		KOTA KUPANG	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	0	1	10.000.000,00	1	10.430.000,00	1	11.579.820,45	1	11.873.947,89	1	12.383.340,25			
5.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat					101.000.000,00		105.343.000,00		108.071.383,70		110.816.396,85		115.570.420,27			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERA H	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daerah																
Tersedianya Dokumen Administarsi BMD pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2	101.000.000,00	2	105.343.000,00	2	108.071.383,70	2	110.816.396,85	2	115.570.420,27			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2				
5.02.01.2.03.005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					52.000.000,00		54.236.000,00		55.640.712,40		57.053.986,50		59.501.602,52		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2	52.000.000,00	2	54.236.000,00	2	55.640.712,40	2	57.053.986,50	2	59.501.602,52			
5.02.01.2.03.006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada					49.000.000,00		51.107.000,00		52.430.671,30		53.762.410,35		56.068.817,75		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
SKPD																
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2	2	2	49.000.000,00	2	51.107.000,00	2	52.430.671,30	2	53.762.410,35	2	56.068.817,75			
5.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					218.000.000,00		227.374.000,00		233.262.986,60		239.187.866,46		249.449.025,93			
Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	11	11	100	218.000.000,00	100	227.374.000,00	100	233.262.986,60	100	239.187.866,46	100	249.449.025,93			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	10		10		10		10		10				
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	1		1		1		1		1				
5.02.01.2.05.001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					10.000.000,00		10.430.000,00		10.700.137,00		10.971.920,48		11.442.615,87		KOTA KUPANG	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	1	10.000.000,00	1	10.430.000,00	1	10.700.137,00	1	10.971.920,48	1	11.442.615,87			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					51.000.000,00		53.193.000,00		54.570.698,70		55.956.794,45		58.357.340,93		Alak	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	1	51.000.000,00	1	53.193.000,00	1	54.570.698,70	1	55.956.794,45	1	58.357.340,93			
5.02.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					15.000.000,00		15.645.000,00		16.050.205,50		16.457.880,72		17.163.923,80		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	1	15.000.000,00	1	15.645.000,00	1	16.050.205,50	1	16.457.880,72	1	17.163.923,80			
5.02.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					10.000.000,00		10.430.000,00		10.700.137,00		10.971.920,48		11.442.615,86		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	1	10.000.000,00	1	10.430.000,00	1	10.700.137,00	1	10.971.920,48	1	11.442.615,86			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					80.000.000,00		83.440.000,00		85.601.096,00		87.775.363,84		91.540.926,95		Alak	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	10	10	80.000.000,00	10	83.440.000,00	10	85.601.096,00	10	87.775.363,84	10	91.540.926,95			
5.02.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					52.000.000,00		54.236.000,00		55.640.712,40		57.053.986,49		59.501.602,52		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	11	11	100	52.000.000,00	100	54.236.000,00	100	55.640.712,40	100	57.053.986,49	100	59.501.602,52			
5.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					2.214.640.000,00		2.309.869.520,00		2.369.695.140,56		2.429.885.397,14		2.534.127.480,68			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	2.214.640.000,00	1	2.309.869.520,00	1	2.369.695.140,56	1	2.429.885.397,14	1	2.534.127.480,68			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	3		3		3		3		3				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1				1		1				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3	3	3		3		3		3		3				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERAH	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	3		3		3		3		3				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
5.02.01.2.06.001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					11.700.000,00		12.203.100,00		12.519.160,29		12.837.146,76		13.387.860,57		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	11.700.00 0,00	1	12.203.10 0,00		12.519.16 0,29	1	12.837.14 6,76	1	13.387.86 0,57			
5.02.01.2.06.00 02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					315.000.0 00,00		328.545.0 00,00		337.054.3 15,50		345.615.4 95,11		360.442.3 99,85		Alak	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	315.000.0 00,00	1	328.545.0 00,00	1	337.054.3 15,50	1	345.615.4 95,11	1	360.442.3 99,85			
5.02.01.2.06.00 03 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					53.000.00 0,00		55.279.00 0,00		56.710.72 6,10		58.151.17 8,54		60.645.86 4,10		KOTA KUPANG	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	1	53.000.00 0,00	1	55.279.00 0,00	1	56.710.72 6,10	1	58.151.17 8,54	1	60.645.86 4,10			
5.02.01.2.06.00 04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					12.000.00 0,00		12.516.00 0,00		12.840.16 4,40		13.166.30 4,58		13.731.13 9,04		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	12.000.000,00	1	12.516.000,00	1	12.840.164,40	1	13.166.304,58	1	13.731.139,04			
5.02.01.2.06.005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					749.000.000,00		781.207.000,00		801.440.261,30		821.796.843,69		857.051.928,54		KOTA KUPANG	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	749.000.000,00	1	781.207.000,00	1	801.440.261,30	1	821.796.843,69	1	857.051.928,54			
5.02.01.2.06.006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					4.440.000,00		4.630.920,00		4.750.860,83		4.871.532,69		5.080.521,45		KOTA KUPANG	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	3	4.440.000,00	3	4.630.920,00	3	4.750.860,83	3	4.871.532,69	3	5.080.521,45			
5.02.01.2.06.007 - Penyediaan Bahan/Material					380.000.000,00		396.340.000,00		406.605.206,00		416.932.978,23		434.819.403,00		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERA H	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	1	380.000.000,00	1	396.340.000,00	1	406.605.206,00	1	416.932.978,23	1	434.819.403,00			
5.02.01.2.06.008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					306.500.000,00		319.679.500,00		327.959.199,05		336.289.362,71		350.716.176,37		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	3	3	3	306.500.000,00	3	319.679.500,00	3	327.959.199,05	3	336.289.362,71	3	350.716.176,37			
5.02.01.2.06.009 - Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					383.000.000,00		399.469.000,00		409.815.247,09		420.224.554,83		438.252.187,76		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	3	383.000.000,00	3	399.469.000,00	3	409.815.247,09	3	420.224.554,83	3	438.252.187,76			
5.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					14.000.000,00		14.602.000,00		14.980.191,80		15.360.688,67		16.019.662,22			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERA H	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	1	14.000.00 0,00		14.602.00 0,00	1	14.980.19 1,80	1	15.360.68 8,67	1	16.019.66 2,22			
5.02.01.2.07.00 05 - Pengadaan Mebel					14.000.00 0,00		14.602.00 0,00		14.980.19 1,80		15.360.68 8,67		16.019.66 2,22		KOTA KUPANG	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	1	1	14.000.00 0,00		14.602.00 0,00	1	14.980.19 1,80	1	15.360.68 8,67	1	16.019.66 2,22			
5.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					830.000.0 00,00		865.690.0 00,00		888.111.3 71,00		910.669.3 99,82		949.737.1 17,08			
Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	830.000.0 00,00	12	865.690.0 00,00	12	888.111.3 71,00	12	910.669.3 99,82	12	949.737.1 17,08			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
5.02.01.2.08.00 01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					30.000.00 0,00		31.290.00 0,00		32.100.41 1,00		32.915.76 1,44		34.327.84 7,61		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	30.000.00 0,00	12	31.290.00 0,00	12	32.100.41 1,00	12	32.915.76 1,44	12	34.327.84 7,61			
5.02.01.2.08.00 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					262.000.0 00,00		273.266.0 00,00		280.343.5 89,40		287.464.3 16,57		299.796.5 35,75		KOTA KUPANG	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	262.000.0 00,00	12	273.266.0 00,00	12	280.343.5 89,40	12	287.464.3 16,57	12	299.796.5 35,75			
5.02.01.2.08.00 04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					538.000.0 00,00		561.134.0 00,00		575.667.3 70,60		590.289.3 21,81		615.612.7 33,72		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	538.000.000,00	12	561.134.000,00	12	575.667.370,60	12	590.289.321,81	12	615.612.733,72			
5.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10.604.000.000,00		11.059.972.000,00		11.346.425.274,80		11.634.624.476,78		12.133.749.866,83			
Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.300	1.300	1.300	10.604.000.000,00	1.300	11.059.972.000,00	1.300	11.346.425.274,80	1.300	11.634.624.476,78	1.300	12.133.749.866,83			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	20		20		20		20		20				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	(Unit)															
5.02.01.2.09.00 02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					10.500.00 0.000,00		10.951.50 0.000,00		11.235.14 3.850,00		11.520.51 6.503,79		12.014.74 6.661,80		KOTA KUPANG	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.300	1.300	1.300	10.500.00 0.000,00	1.300	10.951.50 0.000,00	1.300	11.235.14 3.850,00	1.300	11.520.51 6.503,79	1.300	12.014.74 6.661,80			
5.02.01.2.09.00 06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					47.000.00 0,00		49.021.00 0,00		50.290.64 3,90		51.568.02 6,26		53.780.29 4,58		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	20	47.000.00 0,00	20	49.021.00 0,00	20	50.290.64 3,90	20	51.568.02 6,26	20	53.780.29 4,58			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERAH	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	(Unit)															
5.02.01.2.09.00 09 - Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					57.000.00 0,00		59.451.00 0,00		60.990.78 0,90		62.539.94 6,73		65.222.91 0,45		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi (Unit)	2	2	2	57.000.00 0,00	2	59.451.00 0,00	2	60.990.78 0,90	2	62.539.94 6,73	2	65.222.91 0,45			
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH					12.897.20 8.276,99		13.452.32 9.974,16		13.801.24 6.612,02		14.151.45 1.956,63		14.757.97 4.148,64			
Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang baik (%)	72,79	72,79	73,79	12.897.20 8.276,99	74,79	13.452.32 9.974,16	75,79	13.801.24 6.612,02	76,79	14.151.45 1.956,63	77,79	14.757.97 4.148,64	5.02.0.00. 0.00.02.00 00 - Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah					2.142.181. 751,03		2.234.295. 566,32		2.292.163. 821,49		2.350.384. 782,56		2.451.216. 289,73			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40	40	40	2.142.181.751,03	40	2.234.295.566,32	40	2.292.163.821,49	40	2.350.384.782,56	40	2.451.216.289,73			
	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40	40	40		40		40		40		40				
	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah	2	2	2		2		2		2		2				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	tentang Penjabaran APBD (Dokumen)															
	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40	40	40		40		40		40		40				
	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40	40	40		40		40		40		40				
5.02.02.2.01.00 01 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS					139.624.7 73,31		145.628.6 38,56		149.400.4 20,30		153.195.1 90,98		159.767.2 64,67		KOTA KUPANG	
Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang	2	2	2	139.624.7 73,31	2	145.628.6 38,56	2	149.400.4 20,30	2	153.195.1 90,98	2	159.767.2 64,67			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Disusun (Dokumen)															
5.02.02.2.01.00 02 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS					86.941.89 0,00		90.680.39 1,27		93.029.01 3,40		95.391.95 0,34		99.484.26 5,01		KOTA KUPANG	
Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun (Dokumen)	2	2	2	86.941.89 0,00	2	90.680.39 1,27	2	93.029.01 3,40	2	95.391.95 0,34	2	99.484.26 5,01			
5.02.02.2.01.00 03 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD					87.249.54 0,00		91.001.27 0,22		93.358.20 3,12		95.729.50 1,48		99.836.29 7,09		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40	40	40	87.249.54 0,00	40	91.001.27 0,22	40	93.358.20 3,12	40	95.729.50 1,48	40	99.836.29 7,09			
5.02.02.2.01.00 04 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD					87.695.63 2,50		91.466.54 4,70		93.835.52 8,21		96.218.95 0,62		100.346.7 43,60		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang	40	40	40	87.695.63 2,50	40	91.466.54 4,70	40	93.835.52 8,21	40	96.218.95 0,62	40	100.346.7 43,60			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Diverifikasi (Dokumen)															
5.02.02.2.01.00 05 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD					39.220.24 7,50		40.906.71 8,14		41.966.20 2,14		43.032.14 3,68		44.878.22 2,64		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40	40	40	39.220.24 7,50	40	40.906.71 8,14	40	41.966.20 2,14	40	43.032.14 3,68	40	44.878.22 2,64			
5.02.02.2.01.00 06 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD					86.198.40 2,50		89.904.93 3,81		92.233.47 1,60		94.576.20 1,77		98.633.52 0,83		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi (Dokumen)	40	40	40	86.198.40 2,50	40	89.904.93 3,81	40	92.233.47 1,60	40	94.576.20 1,77	40	98.633.52 0,83			
5.02.02.2.01.00 07 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD					797.003.2 76,98		831.274.4 17,89		852.804.4 25,31		874.465.6 57,72		911.980.2 34,43		Alak	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD (Dokumen)	2	2	2	797.003.276,98	2	831.274.417,89	2	852.804.425,31	2	874.465.657,72	2	911.980.234,43			
5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					778.247.988,24		811.712.651,73		832.736.009,41		853.887.504,05		890.519.277,74		KOTA KUPANG	
Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD (Dokumen)	2	2	2	778.247.988,24	2	811.712.651,73	2	832.736.009,41	2	853.887.504,05	2	890.519.277,74			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.02.2.01.009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					40.000.000,00		41.720.000,00		42.800.548,00		43.887.681,92		45.770.463,72		KOTA KUPANG	
Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran (Dokumen)	0	0	1	40.000.000,00	1	41.720.000,00	1	42.800.548,00	1	43.887.681,92	1	45.770.463,72			
5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah					1.427.307.212,46		1.489.223.163,86		1.528.295.335,33		1.566.767.717,50		1.633.406.955,66			
Tersedianya Dokumen Perbendaharaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai	12	12	12	1.427.307.212,46	12	1.489.223.163,86	12	1.528.295.335,33	12	1.566.767.717,50	12	1.633.406.955,66			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Optimalisasi Kas (Dokumen)															
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERAH	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	100		100		100		100		100				
	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
5.02.02.2.02.001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					329.033.283,38		343.181.714,57		352.070.120,97		361.012.702,05		376.500.146,96		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah (Dokumen)	12	12	12	329.033.283,38	12	343.181.714,57	12	352.070.120,97	12	361.012.702,05	12	376.500.146,96			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.02.2.02.003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					20.000.000,00		20.860.000,00		21.400.274,00		21.943.840,96		22.885.231,74		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD (Dokumen)	2	2	2	20.000.000,00	2	20.860.000,00	2	21.400.274,00	2	21.943.840,96	2	22.885.231,74			
5.02.02.2.02.005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya					302.340.287,50		315.340.919,86		323.508.249,69		331.725.359,23		345.956.377,14		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya (Dokumen)	12	12	12	302.340.287,50	12	315.340.919,86	12	323.508.249,69	12	331.725.359,23	12	345.956.377,14			
5.02.02.2.02.006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank					20.434.460,07		21.854.883,12		22.922.216,12		23.158.121,05		23.576.507,53		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERAH	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (Dokumen)	1	1	1	20.434.460,07	1	21.854.883,12	1	22.922.216,12	1	23.158.121,05	1	23.576.507,53			
5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)					193.175.742,38		201.482.299,30		206.700.690,85		211.950.888,40		221.043.581,51		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pe motongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (Laporan)	12	12	12	193.175.742,38	12	201.482.299,30	12	206.700.690,85	12	211.950.888,40	12	221.043.581,51			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas					119.339.742,38		124.471.351,30		127.695.159,30		130.938.616,35		136.555.882,99		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas (Dokumen)	12	12	12	119.339.742,38	12	124.471.351,30	12	127.695.159,30	12	130.938.616,35	12	136.555.882,99			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATA N OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELI NE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERA H	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.02.2.02.00 09 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait					270.732.0 00,00		282.373.4 76,00		289.686.9 49,03		297.044.9 97,53		309.788.2 27,93		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait (Dokumen)	12	12	12	270.732.0 00,00	12	282.373.4 76,00	12	289.686.9 49,03	12	297.044.9 97,53	12	309.788.2 27,93			
5.02.02.2.02.00 10 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan					30.732.69 6,75		32.054.20 2,71		32.884.40 6,56		33.719.67 0,49		35.166.24 4,35		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERA H	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan																
Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (Dokumen)	2	2	2	30.732.69 6,75	2	32.054.20 2,71	2	32.884.40 6,56	2	33.719.67 0,49	2	35.166.24 4,35			
5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota					141.519.0 00,00		147.604.3 17,00		151.427.2 68,81		155.273.5 21,44		161.934.7 55,51		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	0	0	100	141.519.0 00,00	100	147.604.3 17,00	100	151.427.2 68,81	100	155.273.5 21,44	100	161.934.7 55,51			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	(Orang)															
5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah					767.870.8 13,50		800.889.2 58,48		821.632.2 90,28		842.501.7 50,45		878.645.0 75,54			
Tersedianya Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1	1	767.870.8 13,50	1	800.889.2 58,48	1	821.632.2 90,28	1	842.501.7 50,45	1	878.645.0 75,54			
	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO,	3	3	3		3		3		3		3				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	dan Beban (Dokumen)															
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50		50		50		50		50				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18	18	18		18		18		18		18				
	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	12	12				12		12		12				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2		2		2		2		2				
	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1				1		1		1				
5.02.02.2.03.00 01 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah					50.762.250,00		52.945.026,75		54.316.302,94		55.695.937,04		58.085.292,74		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah (Laporan)	12	12	12	50.762.250,00		52.945.026,75	12	54.316.302,94	12	55.695.937,04	12	58.085.292,74			
5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban					60.642.942,50		63.250.589,03		64.888.779,28		66.536.954,28		69.391.389,62		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban (Dokumen)	3	3	3	60.642.942,50	3	63.250.589,03	3	64.888.779,28	3	66.536.954,28	3	69.391.389,62			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran					167.435.436,00		174.635.159,75		179.158.210,39		183.708.828,93		191.589.937,69		KOTA KUPANG	
Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran (Laporan)	18	18	18	167.435.436,00	18	174.635.159,75	18	179.158.210,39	18	183.708.828,93	18	191.589.937,69			
5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah					164.063.242,50		171.117.961,93		175.549.917,14		180.008.885,04		187.731.266,20		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2	2	2	164.063.242,50	2	171.117.961,93	2	175.549.917,14	2	180.008.885,04	2	187.731.266,20			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Daerah	(Laporan)															
5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota					264.966.942,50		276.360.521,02		283.518.258,53		290.719.622,28		303.191.494,07		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	2	2	264.966.942,50	2	276.360.521,02	2	283.518.258,53	2	290.719.622,28	2	303.191.494,07			
5.02.02.2.03.006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD					20.000.000,00		20.860.000,00		21.400.274,00		21.943.840,96		22.885.231,74		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERA H	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Tanggapan/Tind ak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tind ak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1	1	20.000.00 0,00	1	20.860.00 0,00	1	21.400.27 4,00	1	21.943.84 0,96	1	22.885.23 1,74			
5.02.02.2.03.00 08 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD					10.000.00 0,00		10.860.00 0,00		11.400.27 4,00		11.943.84 0,96		12.885.23 1,74		KOTA KUPANG	
Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD (Dokumen)	1	1	1	10.000.00 0,00	1	10.860.00 0,00	1	11.400.27 4,00	1	11.943.84 0,96	1	12.885.23 1,74			
5.02.02.2.03.00 10 - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan					10.000.00 0,00		10.860.00 0,00		11.400.27 4,00		11.943.84 0,96		12.885.23 1,74		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah																
Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Dokumen)	1	1	1	10.000.00 0,00		10.860.00 0,00	1	11.400.27 4,00	1	11.943.84 0,96	1	12.885.23 1,74			
5.02.02.2.03.00 11 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota					10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50	10.000.00 0,00	50	10.000.00 0,00	50	10.000.00 0,00	50	10.000.00 0,00	50	10.000.00 0,00			
5.02.02.2.03.00 12 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan					10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		10.000.00 0,00		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
BLUD Kabupaten/Kota																
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina (Lembaga)	1	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah					8.204.000.000,00		8.556.772.000,00		8.778.392.394,80		9.001.363.561,63		9.387.522.058,43			
Terlaksananya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	2	2	2	8.204.000.000,00	2	8.556.772.000,00	2	8.778.392.394,80	2	9.001.363.561,63	2	9.387.522.058,43			
	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
5.02.02.2.04.002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah (Laporan)	1	1	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00			
5.02.02.2.04.009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak					8.174.000.000,00		8.526.772.000,00		8.748.392.394,80		8.971.363.561,63		9.357.522.058,43		KOTA KUPANG	
Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak (Laporan)	2	2	2	8.174.000.000,00	2	8.526.772.000,00	2	8.748.392.394,80	2	8.971.363.561,63	2	9.357.522.058,43			
5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah					355.848.500,00		371.149.985,50		380.762.770,12		390.434.144,49		407.183.769,28			
Terlaksananya Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Dearah Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah	1	1	1	355.848.500,00	1	371.149.985,50	1	380.762.770,12	1	390.434.144,49	1	407.183.769,28			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERAH	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Keuangan Daerah	Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)															
5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah					355.848.500,00		371.149.985,50		380.762.770,12		390.434.144,49		407.183.769,28		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah (Dokumen)	1	1	1	355.848.500,00	1	371.149.985,50	1	380.762.770,12	1	390.434.144,49	1	407.183.769,28			
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.087.706.713,89		1.134.523.791,20		1.163.950.234,62		1.193.485.363,18		1.244.637.383,54			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang baik (%)	87,29	87,29	88,29	1.087.706.713,89	89,29	1.134.523.791,20	90,29	1.163.950.234,62	91,29	1.193.485.363,18	92,29	1.244.637.383,54	5.02.0.00.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah		
5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah					1.087.706.713,89		1.134.523.791,20		1.163.950.234,62		1.193.485.363,18		1.244.637.383,54			
Tersedianya Dokumen Pengelolaan BMD	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	2	1.087.706.713,89	2	1.134.523.791,20	2	1.163.950.234,62	2	1.193.485.363,18	2	1.244.637.383,54			
	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERAH	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	50		50		50		50		50				
	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	2		2		2		2		2				
5.02.03.2.01.00 01 - Penyusunan Standar Harga					120.639.8 20,00		125.827.3 32,26		129.086.2 60,17		132.365.0 51,17		138.043.5 11,87		KOTA KUPANG	
Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun (Dokumen)	1	1	1	120.639.8 20,00	1	125.827.3 32,26	1	129.086.2 60,17	1	132.365.0 51,17	1	138.043.5 11,87			
5.02.03.2.01.00 02 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah					31.339.28 0,00		32.686.86 9,04		33.533.45 8,95		34.385.20 8,81		35.860.33 4,26		KOTA KUPANG	
Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan	1	1	1	31.339.28 0,00	1	32.686.86 9,04	1	33.533.45 8,95	1	34.385.20 8,81	1	35.860.33 4,26			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERA H	LOKASI	KET ERA NGA N
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TAR GET	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Barang Milik Daerah	Barang Milik Daerah (Dokumen)															
5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah					413.142.3 20,50		430.907.4 40,28		442.067.9 42,98		453.296.4 68,74		472.742.8 87,25		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	2	413.142.3 20,50	2	430.907.4 40,28	2	442.067.9 42,98	2	453.296.4 68,74	2	472.742.8 87,25			
5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah					218.303.3 12,50		227.690.3 54,94		233.587.5 35,13		239.520.6 58,52		249.796.0 94,77		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah (Laporan)	1	1	1	218.303.3 12,50	1	227.690.3 54,94	1	233.587.5 35,13	1	239.520.6 58,52	1	249.796.0 94,77			
5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah					85.793.33 0,00		89.482.44 3,19		91.800.03 8,47		94.131.75 9,45		98.170.01 1,93		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	1	1	1	85.793.33 0,00	1	89.482.44 3,19	1	91.800.03 8,47	1	94.131.75 9,45	1	98.170.01 1,93			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah (Laporan)															
5.02.03.2.01.00 10 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah					106.221.2 90,00		110.788.8 05,47		113.658.2 35,53		116.545.1 54,71		121.544.9 41,85		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Dokumen)	1	1	1	106.221.2 90,00	1	110.788.8 05,47	1	113.658.2 35,53	1	116.545.1 54,71	1	121.544.9 41,85			
5.02.03.2.01.00 11 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan					68.226.51 5,00		71.160.25 5,15		73.003.30 5,75		74.857.58 9,72		78.068.98 0,32		KOTA KUPANG	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANG KAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Laporan Barang Milik Daerah																
Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah (Laporan)	2	2	2	68.226.515,00	2	71.160.255,15	2	73.003.305,75	2	74.857.589,72	2	78.068.980,32			
5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah					37.482.025,00		39.093.752,08		40.106.280,25		41.124.979,77		42.889.241,40		KOTA KUPANG	
Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun (Laporan)	1		1	37.482.025,00	1	39.093.752,08	1	40.106.280,25	1	41.124.979,77	1	42.889.241,40			
5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota					6.558.820,89		6.886.538,79		7.107.177,39		7.258.492,29		7.521.379,89		KOTA KUPANG	
Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah	50	50	50	6.558.820,89	50	6.886.538,79	50	7.107.177,39	50	7.258.492,29	50	7.521.379,89			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KET ERAN GAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Kabupaten/Kota (Orang)															

Keterangan: Hasil Olahan BKAD, 2025

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH RANCANGAN AKHIR

PEMERINTAH KOTA KUPANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah										
I	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
2	Indeks pengelolaan keuangan daerah (predikat)	Nilai	B	B	A	A	A	A	A	
3	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5,14	5,14	5,15	5,15	5,16	5,17	5,17	
4	Indeks elektronifikasi transaksi pemda (e-TPD)	Indeks	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	
5	Nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD	Persentase	9	9	10	10	15	15	20	
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Predikat SAKIP perangkat daerah	Predikat	B	BB	BB	A	A	A	A	
2	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang baik	%	72,79	72,79	73,79	74,79	75,79	76,79	77,79	
3	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang baik	%	87,29	87,29	88,29	89,29	90,29	91,29	92,29	

Keterangan: Hasil Pengolahan BKAD, 2025

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG
PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR
RENSTRA PEMERINTAH KOTA KUPANG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah				
1.	5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik	5.02.02.2.01 - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	
			5.02.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	
			5.02.02.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
			5.02.02.2.01.0003 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	
			5.02.02.2.01.0004 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	
			5.02.02.2.01.0005 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	
			5.02.02.2.01.0006 - Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	
			5.02.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Penyusunan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah				
			Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	
			5.02.02.2.01.0008 - Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	
			5.02.02.2.01.0009 - Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
			5.02.02.2.02 - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	
			5.02.02.2.02.0001 - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	
			5.02.02.2.02.0003 - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	
			5.02.02.2.02.0005 - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah				
			Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	
			5.02.02.2.02.0006 - Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	
			5.02.02.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
			5.02.02.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	
			5.02.02.2.02.0009 - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah				
			dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	
			5.02.02.2.02.0010 - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	
			5.02.02.2.02.0011 - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.03.0001 - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	
			5.02.02.2.03.0002 - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	
			5.02.02.2.03.0003 - Koordinasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah				
			Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
			5.02.02.2.03.0004 - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0006 - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			5.02.02.2.03.0008 - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
			5.02.02.2.03.0010 - Penyusunan Sistem	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah				
			dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.03.0011 - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.03.0012 - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	
			5.02.02.2.04 - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.04.0002 - Analisis Investasi Pemerintah Daerah	
			5.02.02.2.04.0009 - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	
			5.02.02.2.05 - Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	
			5.02.02.2.05.0002 - Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah				
2.	5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Baik	5.02.03.2.01 - Pengelolaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0001 - Penyusunan Standar Harga	
			5.02.03.2.01.0002 - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0005 - Penatausahaan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0007 - Pengamanan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0008 - Penilaian Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0010 - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0011 - Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	
			5.02.03.2.01.0012 - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
5.02.0.00.0.00.02.0000 - Badan Keuangan dan Aset Daerah				
			5.02.03.2.01.0013 - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	

Keterangan: Hasil Pengolahan BKAD, 2025

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang berkomitmen untuk menyusun laporan kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang telah dirancang. Laporan ini mencakup keluaran dari setiap kegiatan serta indikator kinerja yang melekat pada masing-masing kegiatan tersebut. Indikator kinerja sendiri merupakan ukuran yang bersifat kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja, baik pada tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun setelah kegiatan selesai dan memberikan hasil (*ex-post*). Kedua, indikator ini juga berfungsi sebagai ukuran yang menunjukkan kemajuan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya.

Secara operasional, khususnya dalam sektor publik, evaluasi kinerja dapat dilakukan terhadap kegiatan, program, maupun kebijakan. Dalam konteks program, terdapat beberapa jenis indikator kinerja yang umum digunakan. Indikator masukan (*input*) mencakup segala sesuatu yang diperlukan agar suatu kegiatan dapat berjalan, seperti dana, sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, dan informasi. Indikator keluaran (*output*) menggambarkan hasil langsung dari suatu kegiatan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Indikator hasil (*outcome*) menunjukkan manfaat jangka menengah dari keluaran yang telah dihasilkan. Sementara itu, indikator manfaat (*benefit*) mencerminkan keterkaitan hasil kegiatan dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Terakhir, indikator dampak (*impact*) menggambarkan pengaruh yang ditimbulkan, baik positif maupun negatif, dari kegiatan tersebut terhadap masyarakat atau sektor terkait, berdasarkan asumsi-asumsi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Indikator kinerja BKAD Kota Kupang yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis untuk 5 (lima) tahun ke depan telah dirumuskan secara terukur dan dapat dilihat secara lengkap pada tabel berikut.

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KOTA KUPANG

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETER ANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	5.02.0.00.0.00.02.000 0 - Badan Keuangan dan Aset Daerah									
2.	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
3.	Indeks pengelolaan keuangan daerah (predikat)	Nilai	B	B	A	A	A	A	A	
4.	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5,14	5,14	5,15	5,15	5,16	5,17	5,17	
5.	Indeks elektronifikasi transaksi pemda (e- TPD)	Indeks	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	Digital	
6.	Nilai kontribusi aset daerah terhadap PAD	Persentase	9	9	10	10	15	15	20	

Keterangan: Hasil Pengolahan BKAD, 2025

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KOTA KUPANG

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET TAHUN						KETERA NGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.02 - KEUANGAN										
2.	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang baik	positif	%	87,29	87,29	88,29	89,29	90,29	91,29	92,29	
3.	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang baik	positif	%	72,79	72,79	73,79	74,79	75,79	76,79	77,79	
4.	Predikat SAKIP perangkat daerah	positif	Predikat	B	BB	BB	A	A	A	A	

Keterangan: Hasil Pengolahan BKAD, 2025

BAB V

P E N U T U P

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Kupang merupakan pedoman perencanaan yang disusun melalui pelibatan seluruh jajaran internal BKAD dengan tujuan untuk mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi secara terstruktur. Renstra ini merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2025–2029, dan menjadi tanggung jawab setiap perangkat daerah untuk melaksanakannya secara partisipatif, konsisten, dan transparan. Melalui strategi ini, diharapkan potensi sumber daya daerah dapat dimanfaatkan secara optimal guna memperkuat upaya pencapaian tujuan pembangunan yang akuntabel.

Sebagai dokumen rencana jangka menengah 5 (lima) tahunan, Renstra BKAD Kota Kupang Tahun 2025–2029 menjadi acuan utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Untuk memastikan keberhasilannya, diperlukan konsolidasi internal agar seluruh unit kerja memiliki persepsi yang sama dalam mengaktualisasikan peran dan tanggung jawab masing-masing. Keberhasilan implementasi Renstra sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, efektivitas kelembagaan, sistem tata kelola, serta ketersediaan pendanaan. Selain itu, komitmen seluruh pimpinan dan staf BKAD juga menjadi faktor kunci. Evaluasi berkala setiap tahun akan dilakukan guna menilai dan meningkatkan kinerja kelembagaan, dengan tetap merujuk pada RPJMD Kota Kupang Tahun 2025–2029.

Renstra ini juga diharapkan menjadi pedoman kerja operasional bagi seluruh unit di lingkungan BKAD Kota Kupang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Setiap unit kerja diharapkan dapat mengimplementasikannya secara akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh. Lebih dari itu, Renstra ini hendaknya mendorong aparatur BKAD untuk menjadi pelopor dalam menyosialisasikan pentingnya perencanaan strategis sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk itu, diperlukan komitmen bersama agar seluruh isi Renstra dapat dioperasionalisasikan secara optimal dengan dukungan penuh dari Wali Kota Kupang dan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Kupang, 18 September 2025

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Kupang,

Jackson Jimmy A. Tunliu, SE.,MM
Pembina
NIP. 19750405 200501 1 007

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris	
Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan	